

**ANALISIS *TWO-LEVEL GAME THEORY* DALAM NEGOSIASI ULANG
INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IK-CEPA) PADA SEKTOR PERDAGANGAN**

TAHUN 2019-2022

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SALWA NABILAH SAPUTRI WIBAWA

20323301

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**ANALISIS *TWO-LEVEL GAME THEORY* DALAM NEGOSIASI ULANG
INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AGREEMENT (IK-CEPA) PADA SEKTOR PERDAGANGAN**

TAHUN 2019-2022

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SALWA NABILAH SAPUTRI WIBAWA

20323301

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis *Two-Level Game Theory* Dalam Negosiasi Ulang *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* Pada Sektor Perdagangan Tahun 2019-2022

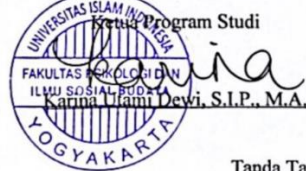
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.
- 3 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

Tanda Tangan

Three handwritten signatures in blue ink are shown, corresponding to the examiners listed on the left. The signatures are written over horizontal lines.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 21 Maret 2024



Salwa Nabilah Saputri Wibawa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	12
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	12
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	13
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2 KERJASAMA EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DAN NEGOSIASI INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT	15
2.1. Negosiasi Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)	15
<i>2.1.1 Perundingan IK-CEPA sebelum reaktivasi</i>	16
<i>2.1.2 Perundingan reaktivasi IK-CEPA hingga Tercapai Kesepakatan</i>	21
2.2. Perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan	28
<i>2.2.1 Neraca Perdagangan, Ekspor, Impor antara Indonesia dengan Korea</i>	28
<i>2.2.2 Perdagangan dalam IK-CEPA</i>	31

2.2.3 <i>Perdagangan terhadap GDP</i>	33
BAB 3 NEGOSIASI ULANG INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT DALAM LEVEL DOMESTIK DAN WIN-SETS	35
3.1 Dinamika Internasional saat perundingan ulang IK-CEPA	35
3.2. IK-CEPA dalam Level Domestik	37
3.2.1 <i>Pemangku atau kelompok kepentingan</i>	42
3.2.2 <i>Dampak keberhasilan perundingan IK-CEPA bagi Indonesia</i>	50
3.3. <i>Win-set Two-Level Games</i>	53
BAB 4 PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia-Korea Selatan (Juta US\$)	29
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perdagangan Indonesia-Korea Selatan 2017-2022 dari GDP	33
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pemetaan Kepentingan dalam <i>win-set</i>	11
Gambar 2. Putaran Sembilan Perundingan IK-CEPA	25
Gambar 3. Putaran Kesepuluh Perundingan IK-CEPA	26
Gambar 4. Prosedur Ratifikasi IK-CEPA	38
Gambar 5. Pemetaan Kepentingan dalam <i>win-set</i>	53

DAFTAR SINGKATAN

AKFTA	: ASEAN-Korea Free Trade Area
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
Covid-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
DPR	: Dewan Permusyawaratan Rakyat
FTA	: <i>Free Trade Area</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GPEI	: Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
IK-CEPA	: <i>Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
JTF-EC	: <i>Joint Task Force on Economic Cooperation</i>
KADIN	: Kamar Dagang dan Industri
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
RCEP	: <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
RoK	: Republic of Korea
ROO	: <i>Rules of Origin</i>
SKA	: Surat Keterangan Asal
TBT	: <i>Technical Barrier to Trade</i>
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WLTFM	: <i>Working Level Task Force Meeting</i>
WTO	: World Trade Organization

ABSTRAK

Perundingan perjanjian kerja sama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* telah dimulai sejak 12 Juli 2012. Pada tahun 2014 perundingan belum mencapai kesepakatan. Alhasil, perundingan ini diberhentikan sementara. Namun, pada tahun 2019 perundingan ini kembali dijalankan dan hebatnya pada perundingan reaktivasi ini akhirnya mencapai kesepakatan hanya dengan melakukan tiga putaran perundingan saja. Maka dari itu, menarik untuk dibahas bagaimana keberhasilan IK-CEPA ini yang ditinjau dengan menggunakan teori *two-level games* yang akan menjelaskan keberhasilan ini harus memenuhi dua aspek atau level. Dua level tersebut, yaitu level I internasional dan level II domestik. Dengan meninjau reaktivasi perundingan kerja sama IK-CEPA ini menghasilkan hasil yang *win-win solution* dan merupakan kerja sama yang berhasil karena kesepakatan yang telah disetujui bersama ini berhasil diratifikasi. Lalu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belah pihak masing-masing memiliki keuntungan dalam memenuhi kepentingannya baik itu memperluas akses pasar, eliminasi tarif, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Walaupun, pada akhirnya Korea Selatan lebih dulu meratifikasinya sehingga mendorong Indonesia agar segera meratifikasi untuk dapat memanfaatkan adanya IK-CEPA.

Kata-kata kunci: IK-CEPA, *two-level games*, kerja sama ekonomi, Indonesia, Korea Selatan.

ABSTRACT

Negotiations on the Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) began on July 12 2012. In 2014 the negotiations had not yet reached an agreement. As a result, these negotiations were temporarily suspended. However, in 2019 these negotiations were carried out again and what was great about the reactivation negotiations was that they finally reached an agreement after just three rounds of negotiations. Therefore, it is interesting to discuss how the success of IK-CEPA is reviewed using the two-level games theory which will explain that this success must fulfill two aspects or levels. The two levels are international level I and domestic level II. By reviewing the reactivation of the IK-CEPA cooperation negotiations, it produced a win-win solution and was a successful collaboration because the mutually agreed agreement was successfully ratified. Then, the research results show that both parties each have advantages in fulfilling their interests, whether expanding market access, eliminating tariffs, and economic recovery after the Covid-19 pandemic. Although, in the end South Korea ratified it first, thus encouraging Indonesia to immediately ratify it to be able to take advantage of the IK-CEPA.

Keywords: *IK-CEPA, two-level games, economic cooperation, Indonesia, South Korea.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemitraan antara Indonesia dengan Korea Selatan sudah berlangsung sejak lama. Kedua negara berupaya untuk selalu meningkatkan kerja sama ekonomi, terutama dalam sektor perdagangan. Salah satunya pada tahun 2007 kedua negara sempat membentuk Indonesia-Korea *Joint Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC). Lalu, JTF-EC diaktifkan kembali pada 2011 menjadi pertemuan rutin dalam *Working Level Task Force Meeting* (WLTFM). Dalam pertemuan rutin ini, nilai ekspor impor kedua negara antara Indonesia dengan Korea Selatan terlihat sama-sama mengalami penurunan (Rompas 2019).

Kemudian, kedua negara kembali berupaya meningkatkan kerja samadengan membentuk *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) pada tahun 2012. Tepatnya, IK-CEPA terbentuk pada 12 Juli 2012 di Jakarta. Perundingan tersebut dilaksanakan pertama kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Lee Myung Bak. Cakupan dari perundingan perjanjian ini ada di berbagai sektor baik itu perdagangan barang dan jasa, investasi penanaman modal, hukum dan kelembagaan, juga kerja sama ekonomi (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2022). Perundingan tersebut membahas mengenai *Term of Reference* (ToR), cakupannya, dan membaginya menjadi tujuh *Working Groups* (WG). Tujuh *Working Groups* tersebut, antara lain *Working Groups on Trade in Good*, *Working Groups on Rules of Origin*, *Customs Procedures and Trade Facilitation*, *Working Groups on Services*, *Working Groups on Investment*,

Working Groups on Rules, Working Groups on Cooperation, dan Working Groups on Legal and Institutional Issues (Rompas 2019). IK-CEPA ini merupakan perpanjangan dari perjanjian ASEAN-Korea FTA (AKFTA).

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa FTA yang merupakan perjanjian perdagangan bebas itu bisa mencakup dari perdagangan barang, perdagangan jasa, juga investasi. Ada beberapa negara yang sudah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia. Salah satunya adalah Korea melalui ASEAN-Korea FTA yang dapat disingkat menjadi AKFTA (FTA Center 2023). AKFTA bertujuan untuk mewujudkan perdagangan bebas serta melancarkan arus barang dan modal bagi negara-negara ASEAN dan Korea Selatan. Kerja sama ekonomi ini berlandaskan atau memakai prinsip-prinsip perdagangan internasional dari WTO atau World Trade Organization (FTA Center 2018). Namun, dalam proses perdagangan internasional ini pun tidak akan terlepas dari adanya tantangan atau hambatan yang muncul.

Kerja sama AKFTA telah disetujui serta penandatanganannya telah dilaksanakan pada 22 November 2015. Implementasi AKFTA di Indonesia pun mulai dijalankan pada 12 November 2018. Adanya AKFTA dapat menghilangkan tarif untuk 80% barang ekspor-impor antara ASEAN dan Korea Selatan (FTA Center 2018). Akan tetapi, hal ini tidak membuat kenaikan pada nilai perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan. Maka dari itu, perundingan IK-CEPA kembali direaktivasi sebagai perpanjangannya yang terbentuk menjadi kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengatasi hambatan perdagangan Indonesia. Bentuk kerja sama bilateral juga memiliki berbagai macam kesepakatan yang terjalin dan pada

penelitian ini akan berpusat pada ranah ekonomi dan lebih dikhususkan dalam sektor perdagangan. Kerja sama ekonomi bilateral tentunya tidak terlepas dari yang namanya perundingan dan juga negosiasi. Negosiasi ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan mengenai *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) sempat terhenti sejak tahun 2014.

Kemudian, pada tahun 2017, hubungan diplomatik Indonesia dengan Korea Selatan mencoba menerapkan kebijakan baru *Special Strategic Partnership*. Yang pada akhirnya, Indonesia bersama Korea Selatan juga mencoba untuk melanjutkan negosiasi IK-CEPA. Perundingan ulang negosiasi IK-CEPA akhirnya kembali berjalan pada awal tahun 2019. Perundingan perjanjian kerja sama ini dilanjutkan setelah sempat terhenti selama lima tahun sejak tahun 2014. Menariknya, kembalinya dijalankan perundingan atau negosiasi ulang mengenai IK-CEPA ini berhasil mencapai kesepakatan. Padahal, sebelumnya itu sempat dihentikan pada putaran ketujuh dan kemudian dilanjutkan kembali pada 2019 lalu, yaitu putaran kedelapan.

Kedua negara berhasil menemukan titik temu dari perjanjian ini dengan ditandai oleh adanya penandatanganan kesepakatan IK-CEPA pada 18 Desember 2020. Hasil IK-CEPA yang telah disepakati bersama ini mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi. Pada perdagangan barang, adanya eliminasi tarif bea masuk. Pada sektor perdagangan jasa, adanya penerapan *Foreign Equity Participation* (FEP) dalam berkomitmen membuka sub-sektor jasa. Pada sektor investasi, terdapat jaminan proteksi dan *market access* yang lebih baik. Kerja sama akan meliputi bidang industry, UMKM, dan sebagainya (Kementerian Perdagangan RI 2020). Ini tidak terlepas dari adanya

strategi negosiasi dari kedua belah pihak serta antara kedua negara ini mempunyai masing-masing kepentingan yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama.

Kunci pentingnya berarti terletak pada jalannya negosiasi. Negosiasi perundingan tersebut diwakili oleh masing-masing negara yang bergabung dalam perjanjian kerja sama antar dua negara, Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia diwakili oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan. Kemudian, Korea Selatan diwakili oleh *Deputy Minister for Trade Negotiations, Ministry of Trade, Industry and Energy*. Tentunya para delegasi dari masing-masing memiliki keahlian pada bidang negosiasi terutama diplomasi ekonomi perdagangan bisnis. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya kepentingan politik dari kedua negara ini. Ekonomi dengan politik sulit untuk dipisahkan. Adanya salah satu cabang dari liberalisasi ekonomi, yaitu liberalisasi perdagangan yang bertujuan untuk membuat arus barang antarnegara menjadi lebih efisien. Liberalisasi perdagangan ini terdiri dari tiga bentuk kerja sama internasional, yaitu perjanjian melalui banyak negara (perdagangan multinasional), regional suatu kawasan dengan mempertimbangkan aspek kesamaan wilayah juga sejarah, dan bilateral baik itu antar dua negara maupun dari negara dengan suatu kelompok negara. Yang mana, diplomasi perdagangan akan terdorong secara maksimal sehingga negara yang bekerja sama dapat memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini diperoleh melalui kerja sama perdagangan yang berkembang dari plurilateral menjadi yang lebih khusus, seperti bilateral dan regional (Malik 2020).

Melihat perkembangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan Korea

Selatan dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, nilai ekspor ke Indonesia berjumlah 7,872 Juta USD dan nilai impor ke Indonesia berjumlah 8,850 Juta USD. Pada tahun 2016, nilai ekspor ke Indonesia berjumlah 6,603 Juta USD dan nilai impor ke Indonesia berjumlah 8,281 Juta USD. Pada tahun 2017, nilai ekspor ke Indonesia berjumlah 8,404 Juta USD dan nilai impor ke Indonesia berjumlah 9,571 Juta USD. Pada tahun 2018, nilai ekspor ke Indonesia berjumlah 8,833 Juta USD dan nilai impor ke Indonesia berjumlah 11,161 Juta USD. Pada tahun 2019, nilai ekspor ke Indonesia berjumlah 7,650 Juta USD dan nilai impor ke Indonesia berjumlah 8,820 Juta USD. Pada tahun 2020, nilai ekspor ke Indonesia berjumlah 6,313 Juta USD dan nilai impor ke Indonesia berjumlah 7,595 Juta USD (Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, n.d.). Berdasarkan data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat penurunan jumlah ekspor dan impor ke Indonesia pada tahun 2015 ke 2016. Kemudian, untuk ke tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan. Yang pada akhirnya, mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 dan 2020.

Mengenai hubungan perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan setelah yang diolah oleh kemendag melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 nilai total perdagangannya mencapai USD 1,6 miliar. Sehingga Indonesia mendapat surplus dari neraca perdagangan antara Indonesia dengan Korea tahun 2018 sebesar USD 443,6 juta. Dengan total ekspor dari Indonesia ke Korea Selatan tahun 2018 ada sekitar USD 9,53 miliar. Sedangkan, untuk Indonesia mengimpor dari Korea Selatan tahun 2018 itu bertotal sekitar USD 9,1 miliar. Kedua total ekspor dan impor ini naik sebanyak 14 dan 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang bertotal USD 8,20 miliar

dan USD 8,12 miliar (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional 2019). Pada tahun 2020, dilihat dari data Korea International Trade Association (KITA) terdapat peningkatan beberapa produk Indonesia yang diekspor ke Korea Selatan, yaitu Tisu atau *Napkin* dan produk *Flat-rolled Stainless Steel*. Selain itu, peningkatan juga terjadi di produk-produk bijih tembaga dan konsentrat, *industrial monocarboxylic fatty acids acid oils from refining industrial fatty alcohols*, dan produk-produk turunan dari *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Republik Korea 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses disepakatinya perjanjian IK-CEPA dalam sektor perdagangan menggunakan analisis *Two-Level Games* menurut Robert D. Putnam?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menjalankan negosiasi ulang *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA).
2. Untuk menganalisis keberhasilan dari proses negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA).
3. Untuk mengetahui proses negosiasi dari dua tingkatan pendekatan *Two-Level Games*, yaitu ranah internasional dan domestik.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini mencakup segala hal yang berkaitan dalam proses negosiasi ulang *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-

CEPA) dalam sektor perdagangannya hingga meraih kesepakatan bersama. Segala hal yang berkaitan itu seperti persiapan yang dilakukan, strategi negosiasi yang diambil oleh Indonesia, hambatan-hambatan yang terjadi, dan sebagainya. Negosiasi IK-CEPA yang awalnya dimulai pada tahun 2012 dan sempat terhenti pada tahun 2014 karena tidak berhasil mencapai kesepakatan, kini dilanjutkan kembali pada tahun 2019. Yang mana, perundingan IK-CEPA kemudian berhasil disepakati pada akhir 2020. Kemudian, kesepakatan ini berhasil diratifikasi pada 27 September 2022. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada negosiasi ulang, yaitu pada tahun 2019 hingga 2022 karena pada rentang waktu inilah negosiasi ulang IK-CEPA dapat berhasil mencapai suatu kesepakatan hingga diratifikasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Ulim Maidatul Cholif dan Arie Kusuma Paksi bersama-sama menulis dan melakukan riset mengenai kepentingan Korea Selatan dalam reaktivasi negosiasi IK-CEPA dengan Indonesia. Dalam penelitian ini, para penulis menjelaskan mengenai IK-CEPA dari awal hingga dihentikan sementara. Lalu, penulis juga mencari tahu alasan yang melatarbelakangi negosiasi itu kembali dijalankan. Tentunya, hal ini dilakukan dianalisis melalui konsep kepentingan nasional dan kerja sama yang terjalin dari sudut pandang Korea Selatan. Dalam penelitian ini, dapat terlihat bahwa Korea Selatan menjalankan kembali negosiasi perjanjian ini untuk mendapatkan surplus dari perdagangan serta dapat banyak berinvestasi di Indonesia (Cholif and Paksi 2022).

Audrey Dylania Muchsya melakukan riset mengenai kerja sama Korea Selatan dengan Indonesia dalam hubungan *special strategic partnership* di bidang ekonomi dalam rentang tahun 2018 hingga 2019. Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan studi pustaka mengenai cara-cara serta proses yang dilakukan oleh kedua negara untuk dapat meningkatkan kerja sama ekonomi dan hubungan spesial tersebut. Hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin dari lama. Muchsya menulis penelitian ini dengan menggunakan teori kepentingan nasional, kerja sama, dan negosiasi sehingga dapat menyimpulkan bahwa kerja sama yang terjalin antara kedua negara tersebut merupakan salah satu upaya dari pemenuhan kepentingan nasional. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai awal mula IK-CEPA. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kegagalan negosiasi tersebut dikarenakan tidak adanya jaminan mengenai FDI di Indonesia dari Korea Selatan, serta adanya pembukaan pasar agrikultur Korea Selatan pada produk agrikultur Indonesia. Pada intinya, negosiasi antara kedua negara dalam negosiasi IK-CEPA tidak menemukan titik terangnya. Juga menjelaskan secara singkat mengenai kelanjutan IK-CEPA dalam perwujudan meningkatkan hubungan *special strategic partnership* (Muchsya 2020).

Kemudian, Rizal Budi Santoso dan Achmad Alfaron Alamsyah melakukan penelitian mengenai “Digital Economy Working Group G20 pada masa Presidensi Indonesia tahun 2022”. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi dapat membangun tata kelola ekonomi digital global pasca pandemi. Penelitian ini turut membahas IK-CEPA yang menciptakan tercapainya kepentingan nasional dalam berdiplomasi. Ekonomi digital juga tercantum dalam perundingan kerja sama IK-CEPA, seperti perdagangan produk dan jasa, kerja sama ekonomi, investasi, dan sebagainya (Santoso and Alamsyah 2023, 22).

Ketiga tinjauan penelitian tersebut menjelaskan awal mula IK-CEPA, negosiasi IK-CEPA sebelum reaktivasi atau alasan yang melatarbelakangi negosiasi IK-CEPA itu dijalankan kembali. Penelitian tersebut juga ditinjau dari kepentingan nasionalnya Korea Selatan, perdagangan, investasi, ekonomi digital, dan sebagainya. Penulis belum melihat adanya pembahasan terkait analisis teori *two-level games* pada keberhasilan proses negosiasi ulang IK-CEPA hingga akhirnya tercapai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan diratifikasi. Mereka hanya menjelaskan secara singkat adanya negosiasi ulang, tetapi tidak ada yang membahas bagaimana keberhasilan tersebut dapat diraih.

Tinjauan pustaka pertama ini meneliti dengan memakai sudut pandang Korea Selatan. Sedangkan, penulis menggunakan sudut pandang Indonesia. Tinjauan pustaka kedua berbeda dari apa yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini karena dari rentang waktu penelitiannya pun berbeda. Rentang waktu penelitian tinjauan kedua ini berkisar pada tahun 2018 hingga 2019 sehingga penelitian ini meneliti pada upaya-upaya yang dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan *special strategic partnership*. Tinjauan pustaka ketiga berbeda karena penelitian ini membahas sedikit mengenai IK-CEPA dan lebih berfokus kepada *digital economy* yang termasuk ke dalam pembahasan perundingan IK-CEPA. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai proses disepakatinya negosiasi ulang IK-CEPA dalam sektor perdagangan.

1.6 Kerangka Pemikiran

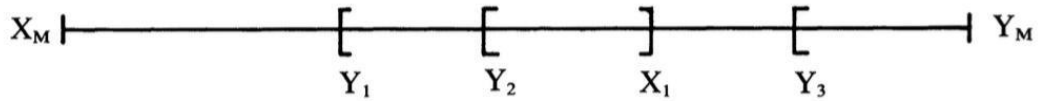
Dalam menganalisis mengenai alasan dan proses negosiasi ulang IK-CEPA hingga bisa mencapai kesepakatan terutama apabila dilihat dalam sektor

perdagangan. Konsep teori *two-level game* dari Robert D. Putnam dapat diaplikasikan ke dalam penelitian ini dengan harapan dapat mengetahui proses serta alasan dari kesepakatan tersebut bisa berhasil atau gagal. Kemudian, dengan menggunakan teori *two-level game* menurut Robert D. Putnam ini dapat mengukur bagaimana strategi suatu negara terlihat dari adanya dua level. Lalu, hal tersebut juga dapat memberikan informasi berupa pendekatan, strategi, dan taktik mereka demi mencapai tujuan (Putnam 1988).

Seperti yang telah disampaikan bahwa teori *two-level game* ini membagi proses pencapaian kesepakatan dalam dua level, yaitu level pertama pada tingkat internasional dan level kedua pada tingkat domestik. Level pertama yang disebut juga dengan tingkat internasional itu merupakan proses negosiasi atau tawar-menawar (*bargaining*) antara negosiator dari masing-masing perwakilan negara yang menjalin kerja sama. Kemudian, hal ini akan berujung atau mengarah pada kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, kesepakatan bersama ini belum menentukan keberhasilan dari perjanjian. Maka dari itu, dalam teori ini juga ada yang namanya “*win-set*” (Putnam 1988).

Level kedua ini merupakan hasil kesepakatan dari negosiasi pada level pertama yang dibawa ke dalam negeri untuk dapat disetujui dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di dalam negeri. Hasil dari perjanjian adalah dengan adanya kebijakan pemerintah untuk meratifikasi kesepakatannya dan adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Setelah perjanjian ini dapat disetujui dan diratifikasi pada masing-masing negara yang melakukan kesepakatan, maka perjanjian ini dapat dikatakan berhasil. Lalu, garis *win-set* memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y.

Gambar 1. Pemetaan Kepentingan dalam *win-set*



Sumber: Putnam (1988)

Titik X_M merupakan kepentingan maksimum dari variabel X. Titik Y_M merupakan kepentingan maksimum dari variabel Y. Titik X_1 merupakan kepentingan minimum variabel X. Titik Y_1 merupakan kepentingan minimum variabel Y. Apabila titik Y berada antara rentang X_1 dan Y_1 , diumpamakan titik Y_2 , maka perundingan kerja sama tersebut dapat meraih kesepakatan dan bisa melanjutkan dalam tahap ratifikasi. Hal ini dikarenakan pada titik Y_2 tidak melewati titik kepentingan minimum yang dapat disetujui oleh kedua variabel. Jika titik perundingan ini berpindah ke titik Y_3 , maka perundingan itu tidak bisa tersepakati. Hal ini dikarenakan oleh titik Y_3 itu melewati titik minimum dari kepentingan X sehingga tidak ada himpunan atau tumpang tindih dari kedua kepentingan tersebut (Putnam 1988).

Garis *win-set* tersebut merupakan pemetaan kepentingan dari yang melakukan kerjasama. Titik perundingan Y mempunyai dua kemungkinan, bisa menempati titik Y_2 atau Y_3 . Perundingan akan berhasil pada titik Y_2 dan perundingan akan gagal pada titik Y_3 . Ukuran *win-set* itu juga penting karena semakin besar *win-set* salah satu pihak akan membuat mereka lebih bisa menguasai jalannya negosiasi atau kerja sama. Ada tiga faktor penting yang mempengaruhi *win-set*, yaitu tergantung pada distribusi kekuatan, preferensi, dan koalisi pada konstituen level II; tergantung institusi politik; dan strategi negosiator level I (Putnam 1988).

Oleh karena itu konsep teori *two-level games* dari Robert D. Putnam ini sangat tepat diaplikasikan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari adanya aspek atau level yang dapat menilai bagaimana proses keberhasilan atau kegagalan dari suatu kesepakatan. Tentunya dengan mengetahui proses keberhasilan ini diperlukan penjabaran dari dua aspek level ini. Hal tersebut sangat relevan untuk dapat menjawab atau menganalisis jalannya negosiasi ulang IK-CEPA ini.

1.7 Argumen Sementara

Penulis berpendapat bahwa proses negosiasi ulang *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) bisa dikatakan sebagai perjanjian kerjasama yang berhasil dikarenakan negosiasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan oleh kedua belah pihak (*win-win solution*) juga dapat diratifikasi serta diimplementasikan ke dalam negeri. Hal ini dapat diukur dari adanya aspek-aspek dari teori *two-level games* menurut Robert D. Putnam. Dalam menjalani proses negosiasi ulang dengan mempertimbangkan banyak hal, semua pihak berkolaboratif mencari titik temu demi tercapainya perjanjian kerjasama IK-CEPA sebagai bentuk pengembangan perjanjian yang pernah dilakukan, misalnya Indonesia (ASEAN) dengan Korea FTA (AKFTA). Maka dari itu, diharapkan dengan teori ini kita dapat mengetahui bagaimana kesepakatan kerjasama ini dapat diterima baik oleh banyak pihak.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kemudian, penulis juga menggunakan metode penelitian dengan kajian pustaka dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan

wawancara. Sehingga diharapkan dengan jenis dan metode penelitian ini dapat memberikan jawaban bagi rumusan masalah tersebut.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintah Indonesia. Lalu, objek penelitiannya adalah keberhasilan negosiasi ulang *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Yang mana, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui kajian atau studi literatur dari situs resmi terpercaya, buku, jurnal, berita, dan sebagainya.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Beberapa tahapan tersebut adalah membaca banyak referensi dan data yang terkait dengan penelitian; menghimpun, mengolah, dan menyeleksi data yang dianggap cocok untuk dimasukkan dalam penelitian; dan menganalisis data sesuai dengan pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk dapat mempermudah mengikuti alur pembahasan, sebagai berikut:

- BAB I

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

- BAB II

Pada bab II ini, penulis akan menganalisis proses negosiasi kesepakatan IK-CEPA pada tingkat internasional yang merupakan satu dari dua aspek yang menentukan keberhasilan kesepakatan dalam teori *Two-Level Games*.

- BAB III

Pada bab III ini, penulis akan menganalisis proses negosiasi kesepakatan IK-CEPA pada tingkat domestik dan *win-set* perundingan IK-CEPA.

- BAB IV

Pada bab terakhir ini, akan berisikan uraian singkat serta rangkuman yang menjawab dan pembuktian dari argumen sementara yang dibangun oleh penulis, serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB 2

KERJASAMA EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DAN NEGOSIASI *INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*

Pada bab ini, penulis akan memberikan data-data cakupan internasional yang akan dikaitkan atau dianalisis menggunakan aspek pertama dari teori *Two-Level Games*, yaitu Level I pada tingkat internasional. Hal ini akan banyak berkuat pada perundingan negosiasi *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA), terkhusus pada perundingan ulangnya dalam sektor perdagangan yang mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Dalam bab aspek internasional ini akan menjelaskan mengenai pertimbangan kedua negara dalam negosiasi ulang tersebut, bagaimana proses negosiasi hingga pada akhirnya kesepakatan dapat diraih.

2.1. Negosiasi *Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)

Negosiasi antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam balutan kerjasama *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA) terbentuk pada tahun 2012. IK-CEPA yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang lebih inklusif dalam mengatur mengenai perdagangan barang dan jasa, juga investasi. Selain itu, melalui kerjasama ini bisa dikatakan perpanjangan tangan dari kerjasama ASEAN-Korea FTA. IK-CEPA sempat terhenti pada tahun 2014, tepatnya pada perundingan putaran ketujuh. Hal ini dikarenakan oleh belum adanya titik temu dari beberapa putaran perundingan yang telah dilaksanakan

selama ini. Maka dari itu, kita perlu menganalisa bagaimana perundingan yang dulu dihentikan sementara, juga bagaimana perundingan ulang ini bisa berhasil menemukan titik temu.

2.1.1 Perundingan IK-CEPA sebelum reaktivasi

Pembentukan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan itu berlangsung sejak tahun 1973 dan hubungan ini terus terjalin dengan baik hingga sekarang. Korea yang merupakan salah satu mitra penting dalam perdagangan internasional. Bahkan, perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan pada 2010 ini mencapai sekitar USD 20,3 miliar. Maka dari itu, pembahasan mengenai Indonesia dengan Korea Selatan untuk menjalin kerjasama dengan lebih erat itu sudah dilakukan sejak lama. Salah satu upaya menjalin kerjasama menjadi lebih erat dilakukan dalam konsep perjanjian perdagangan bebas yang terhubung antara organisasi regional ASEAN dengan Korea (Kementerian Perdagangan 2011).

Oleh karena itu, adanya *ASEAN-Korea Free Trade Agreement* (AKFTA) itu diharapkan dapat mengurangi hambatan tarif dan non-tarif perdagangan yang ada diantara ASEAN dengan Korea itu sendiri. Namun, Indonesia dengan Korea pastinya juga ingin memiliki hubungan yang lebih baik lagi dan tentunya akan memiliki keuntungan yang saling menguntungkan. Indonesia dengan Korea Selatan ingin mengumumkan mengenai inisiasi perundingan antara kedua negara dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). Pengumuman inisiasi CEPA dilakukan pada *ASEAN-Republic of Korea Summit* yang ke-14, tepatnya pada November 2011 (Kementerian Perdagangan 2011).

Saat IK-CEPA sempat terhenti sementara pada tahun 2014, IK-CEPA telah melakukan tujuh putaran perundingan. Sebenarnya awal kedua negara memulai berbincang untuk melakukan perundingan IK-CEPA itu terjadi pada awal tahun 2012. Tepatnya, perbincangan tersebut terjadi pada 28 Maret 2012 saat Indonesia mengunjungi Korea Selatan dalam *bilateral meeting* acara “*Nuclear Security Summit*”. Yang kemudian dilaksanakannya perundingan pertama IK-CEPA, 12 Juli 2012, yang dipimpin oleh ketua tim negosiasi pihak Indonesia (Sahala Lumban Gaol) dan Kim Young Moo selaku ketua tim negosiasi pihak Korea Selatan. Bahasan perundingan pertama ini ada *scope* dan *coverage*, serta dibaginya *working groups* (Suryanto 2012).

Pada perundingan pertama ini membahas dan telah disepakati mengenai *scope* dan *coverage* perjanjian ini ada *Trade in Goods, Rules of Origin, Customs* (termasuk *Customs Procedures*), *Trade Facilitation, Trade in Services, Investment, Intellectual Property Rights, Sustainable Development*, dan *Competition*. Kemudian terdapat beberapa *pending issues* yang juga menyangkut *scope* dan *coverage*, yaitu *trade remedies and cooperation*, dan *capacity building* (Rahim and Sudirman 2023, 7-8). Perundingan-perundingan terus dilakukan secara berprogres dan ada *issues pending* hingga masuk kepada putaran perundingan keenam.

Pada perundingan ke-6 negosiasi IK-CEPA itu berlangsung di hotel Discovery Kartika Plaza (Bali) pada 4 hingga 8 November 2013. Pada tanggal 5 November 2013, dimulai dengan pertemuan atau pembahasan yang ke-2 mengenai bagian *Technical Barrier to Trade* (TBT). Dalam menghadiri perundingan tersebut, pihak Indonesia diwakili oleh Kepala Pusat Kerjasama

Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (PKS BSN), yaitu Erniningsih. Beliau juga didampingi oleh Kabid Kerjasama Standardisasi Internasional, Kasubbid Bilateral dan Regional Badan Standardisasi Nasional. Juga dihadiri perwakilan dari Pusat Standardisasi Kementerian Perindustrian, Direktorat Standardisasi Kementerian Perdagangan, dan Badan Karantina Kementerian Pertanian dengan perbandingan masing-masing 1:2:2 perwakilan (orang). Perwakilan Korea Selatan didelegasikan oleh *FTA-TBT Team Leader Korean Agency for Technology and Standards* (KATS), yaitu Park Jai-hun (Badan Standardisasi Nasional 2013).

Putaran perundingan ke-6 ini membahas lebih lanjut mengenai *Standards, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedure* (STRACAP), juga berdiskusi mengenai *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) untuk tetap tercantum dari IK-CEPA. Kedua negara memang sepakat bahwa hal ini merupakan hal yang berbeda dari bagian TBT. Selain itu, terdapat isu lain yang turut dibahas mengenai Lembaga Pelatihan Kerja Bahasa Korea (LPK) yang dapat berjalan dan juga diakreditasi di Indonesia melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dalam perundingan ke-6 ini berjalan hingga akhir, terdapat pula beberapa hal yang belum terselesaikan dan menjadi *pending issues*. Beberapa hal tersebut, yaitu *Conformity Assessment Procedure* (CAP), Transparansi, dan pembentukan *working group* untuk Baja. Ketiga pending issues ini akan dibahas kembali dalam bentuk teleconference agar pembahasan mengenai bagian TBT ini selesai pada akhir November 2013 (Badan Standardisasi Nasional 2013).

Perundingan ketujuh dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2014 di Seoul yang memiliki beberapa isu yang *pending*. Berdasarkan data Kementerian

Perdagangan Republik Indonesia, IK-CEPA yang sempat terhenti setelah tujuh putaran perundingan ini terjadi karena perundingan tidak menghasilkan kesepakatan bersama. Dirasa bahwa konsesi perundingan tidak dalam suatu keputusan yang seimbang, seperti pada perdagangan barang terkhusus dalam *Package Deal* eliminasi tarif antara kedua negara masih belum dapat memenuhi kebutuhan dari kepentingan masing-masing negara. Lalu, karena IK-CEPA itu mencakupi perdagangan juga investasi. Jadi, dari segi investasi juga terlihat bahwa belum ada nilai investasi yang termuat dalam perjanjian, sehingga jaminan investasi belum dapat diberikan secara pasti oleh Korea Selatan (Santoso and Dewi 2022, 352).

Tentunya ini akan berpengaruh pada perluasan market investasi dalam industri, terkhusus otomotif juga elektronik. Jaminan ini tidak bisa ditentukan oleh pemerintah Korea Selatan karena pihak swasta memegang peran yang sangat penting dalam pembuatan keputusan mengenai hal ini (Santoso and Dewi 2022, 352). Intinya, hal ini berakhir dengan tidak mencapai kesepakatan karena pada awalnya ada tawar-menawar antara kedua negara terkait *package deal* eliminasi tarif akses pasar (pos tarif). Indonesia menyetujuinya dengan syarat Korea Selatan dapat meningkatkan investasinya ke Indonesia di beberapa sektor. Rupanya sektor tersebut bukan milik negara yang membuat Korea Selatan tidak dapat memutuskannya pada saat itu (Rompas 2019).

Selain itu, perundingan ini dihentikan sementara pada tahun 2014. Sesuai dengan siaran pers dari kementerian perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut dihentikan juga karena bertepatan dengan pergantian pemerintahan, yaitu pemilihan presiden 2014 (Kementerian Perdagangan 2020). Pada tahun 2014,

Korea Selatan berada dibawah kepemimpinan Presiden Park Geun-hye yang berasal dari Partai Saenuri. Partai tersebut termasuk dalam partai konservatif Korea Selatan. Partai Saenuri sangat mendukung bisnis terhadap, *Chaebol*, pengusaha besar Korea Selatan. Dengan kepribadian Park Geun-hye yang idealis sehingga Beliau sangat selektif mengenai hubungan kerja sama (Lestari, Karjaya, and Sood 2021, #).

Korea Selatan membuat rencana inovasi tiga tahun yang diapresiasi oleh IMF dan OECD. Park Geun-hye melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan Cina dan Selandia Baru (KBS WORLD INDONESIA 2014). Pada akhir tahun 2016, Presiden Park Geun-hye terjerat kasus korupsi bersama dengan Choi Soon-sil yang merupakan teman dekatnya. Park Geun-hye dituduh meminta imbalan kepada perusahaan dari adanya kemudahan akses yang pemerintah berikan. Maka dari itu, Park Geun-hye diturunkan dari jabatannya oleh parlemen pada desember 2016 (BBC 2017).

Moon Jae-in selaku Presiden Korea Selatan yang baru dilantik pada Mei 2017 mencoba untuk meningkatkan hubungan negaranya dengan beberapa negara ASEAN juga India dengan membuat kebijakan *New Southern Policy*. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi interdependensi Korea Selatan terhadap negara-negara maju. Pada November 2017, beliau pertama kali memulai kunjungan luar negerinya di Indonesia. Pada pertemuan itu pula kedua kepala negara menyepakati peningkatan hubungan kemitraan menjadi *Special Strategic Partnership*. Yang diharapkan dengan meningkatnya hubungan kedua negara akan membuat hubungan tidak lagi sebatas mitra yang hanya berupa transaksional,

melainkan akan dilandasi dengan semangat gotong royong (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

Pada September 2018, Presiden Joko Widodo mengunjungi Korea Selatan (Seoul). Hal ini juga bertepatan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan yang telah berjalan selama 45 tahun dan bahkan sudah mempunyai hubungan yang baik berupa *Special Strategic Partnership* (Humas Sekretariat Kabinet RI 2018). Selain itu, Indonesia juga turut berkomitmen untuk segera menyelesaikan putaran perundingan IK-CEPA. Alhasil dari komitmen untuk melanjutkan perundingan dari kedua negara tersebut langsung diperlihatkan pada adanya pertemuan tindak lanjut antara Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan Ministry of Trade, Industry, and Energy (MOTIE) Korea Selatan. Pertemuan itu dilakukan pada November 2018 saat *East Asia Summit* di Singapura (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

Maka dari itu, melihat kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan yang telah berlangsung lama juga perundingan IK-CEPA yang sempat terhenti. Hal tersebut merupakan bukti secara faktual teori two level games yang menunjukkan bahwa aspek internasional dengan domestik saling berkaitan. Aspek-aspek dari domestik dapat mempengaruhi keputusan negara dalam suatu perjanjian kerja sama. Pergantian stakeholder (pemangku kebijakan) dari suatu negara juga dapat membuat kebijakan negara yang berbeda pula.

2.1.2 Perundingan reaktivasi IK-CEPA hingga Tercapai Kesepakatan

Reaktivasi dari perundingan negosiasi IK-CEPA disepakati oleh kedua negara secara tertulis sebagai komitmen menjalankan perundingan kembali. Komitmen tertulis, *Joint Ministerial Statement*, itu ditandatangani oleh Menteri

Perdagangan Republik Indonesia (Enggartiaso Lukita) dan Menteri Perdagangan Republik Korea (Hyun Chong Kim) pada 19 Februari 2019 di Indonesia dalam forum bisnis antara Indonesia dengan Korea (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019). Awalnya, rencana melaksanakan perundingan IK-CEPA setelah resmi direaktivasi oleh Indonesia juga Korea Selatan itu dicanangkan dimulai pada 29 hingga 30 April 2019. Namun, pada realitanya putaran perundingan IK-CEPA yang kedelapan ini dilaksanakan pada 30 April hingga 2 Mei 2019. Tempat perundingan kali ini dilakukan di Seoul, Korea Selatan (Kementerian Perdagangan RI 2019).

Ketua Tim Negosiasi dari perwakilan Indonesia untuk IK-CEPA adalah Iman Pambagyo yang merupakan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Kemudian, perwakilan negosiasi Korea Selatan untuk IK-CEPA ada Yeo Han Koo yang merupakan *Deputy Minister of Trade Negotiations, Ministry of Trade, Industry, and Energy* (MOTIE) Korea. Dalam putaran perundingan kali ini, jalannya negosiasi dibagi menjadi 3 *working groups meeting* yang dilakukan secara paralel (bersamaan). Ketiga pertemuan kelompok kerja tersebut mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa, juga membahas mengenai ketentuan asal, prosedur bea cukai, dan fasilitas perdagangan (Kementerian Perdagangan RI 2019).

Perkembangan dari *Trade in Goods* (perdagangan barang) itu terlihat pada 25 April 2019 antara Indonesia dengan Korea Selatan telah saling memberikan permintaan awal (*initial request*). Pada putaran perundingan ini keduanya mencoba untuk bertukar perspektif mengenai hal itu. Bahasan perspektif atau pandangan masing-masing negara itu membuat kedua negara memiliki satu suara

untuk membahas mengenai akses pasar dan teks perjanjian dengan lebih intensif. Selain itu, Indonesia dengan Korea Selatan turut berbincang mengenai teknis pertukaran penawaran (*offer*) yang akan dilaksanakan pada 12 Juni 2019 (Kementerian Perdagangan RI 2019).

Pembahasan selanjutnya, kedua negara mulai meninjau kembali teks hasil perundingan putaran ketujuh pada bab perdagangan jasa. Akses pasar jasa untuk beberapa sektor jasa pun turut dibahas. Beberapa sektor jasa tersebut ada jasa distribusi, jasa hukum, jasa konstruksi, profesional independen, magang, dan peningkatan kapasitas. Pembahasan pada *working groups* berikutnya adalah *Rules of Origin Custom Procedure, and Trade Facilitation* (ROOCPTF)(Kementerian Perdagangan RI 2019).

Bab mengenai *rules of origin* (ROO) dan *custom procedure and trade facilitation* (CPTF) telah disesuaikan dengan perkembangan ROO, perjanjian bilateral yang telah diterapkan dan diselesaikan. Hal ini juga telah disesuaikan dengan konsep teks dari kesepakatan RCEP. Isu-isu lain yang dibahas pada putaran kedelapan ini ada diskusi mengenai konsep dari kerja sama dan peningkatan kapasitas atau *Cooperation and capacity building* (CCB) dalam cakupan IK-CEPA. Tidak kalah menarik, perundingan kali ini terdapat diskusi dengan beberapa pelaku usaha yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan saran terbaik dari mereka sehingga kesepakatan IK-CEPA yang akan diraih nantinya dapat bermanfaat dan mempermudah jalan para pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha yang menghadiri diskusi tersebut ada Hyundai Motors, Lotte Chemical, Buhmwo Chemical, Sinsin Pharmaceutical, Korea Food Industry Association, Korea Ginseng Corporation sebagai perwakilan pelaku usaha dari korea.

Sedangkan dari Indonesia itu dihadiri oleh kamar dagang dan industri Indonesia atau lebih dikenal dengan KADIN Indonesia (Kementerian Perdagangan RI 2019).

Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dilaksanakan pada 28 Juni 2019 di Osaka. Perwakilan Indonesia pada pertemuan ini adalah Presiden Joko Widodo yang didampingi juga dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Pada pertemuan ini, pihak Indonesia sudah mulai membuka bahasan untuk mempercepat terjalannya kerjasama bilateral yang inklusif, yaitu IK-CEPA. Hal ini ditandai dengan disampaikannya pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik yang mengedepankan prinsip keterbukaan serta menghormati hukum internasional dalam meningkatkan kerjasama seterusnya (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2019).

Tak hanya Pak Airlangga Hartarto, sejumlah Menteri dari Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara, Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, Enggartiaso Lukita selaku Menteri Perdagangan, juga hadir Thomas Trikasih Lembong selaku Kepala BKPM dan Arifin Tasrif selaku Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, turut mendukung pandangan atau *outlook* tersebut. Kemudian, masing-masing kepala negara antara Indonesia dengan Korea Selatan berdiskusi terkait kerjasama antara kedua negara tersebut. Salah satunya adalah adanya kesepakatan antara kedua negara untuk menjalankan perundingan kembali kerjasama IK-CEPA dengan lebih cepat sehingga diharapkan negosiasi perjanjian kerjasama ini dapat terselesaikan pada akhir tahun 2019 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019).

Gambar 2. Putaran Sembilan Perundingan IK-CEPA



Sumber: Kementerian Perdagangan RI (2019)

Putaran perundingan IK-CEPA yang kesembilan dilaksanakan di Korea Selatan, tepatnya di pulau Jeju pada 27 hingga 30 Agustus 2019. Perwakilan masing-masing negara pada perundingan ini ada Iman Pambagyo selaku Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Yeo Han Koo selaku Wakil Menteri Perundingan Perdagangan Korea Selatan. Terdapat 6 pertemuan *working groups* dan 2 *sub working groups*. Pertemuan-pertemuan tersebut membicarakan topik pembahasan mengenai mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, *customs procedures and trade facilitation*, kerjasama dan pengembangan kapasitas, juga isu hukum dan kelembagaan. Yang mana pada perdagangan barang itu juga mencakup 2 *sub working groups* tersebut, yaitu mengenai pengamanan perdagangan dan teks perdagangan barang (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2019).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia sangat berharap untuk menyelesaikan *issues pending* yang ada tak terkecuali mengenai draft teks. Dengan terselesainya hal ini, dapat membuat putaran selanjutnya membahas

mengenai akses pasar dan penanaman program kerja (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2019). Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, dalam pertemuan bilateral dengan Korea Selatan di Bangkok (Thailand) pada 9 September 2019 juga menuturkan harapan. Beliau berharap IK-CEPA dapat menjadi pelindung dari adanya rencana investasi dari perusahaan di bidang kimia “Lotte Group” dan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif seperti Hyundai (Kementerian Perdagangan RI 2019).

Gambar 3. Putaran Kesepuluh Perundingan IK-CEPA



Sumber: Kementerian Perdagangan RI (2019)

Kemudian, putaran perundingan IK-CEPA yang kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 8-11 Oktober 2019 di Bali. Pada acara pembukaan hari pertama perundingan IK-CEPA yang kesepuluh ini dibuka oleh Iman Pambagyo selaku Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan Ketua Tim Perunding Indonesia dalam IK-CEPA. Lalu, dari pihak perwakilan Korea Selatan yang menghadiri perundingan ini ada Yeo Han Koo selaku *Deputy Minister for Trade Negotiations, Ministry of Trade, Industry, and Energy*. Pada pertemuan kali ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu perundingan dibagi menjadi beberapa *working groups*.

Beberapa working groups tersebut, yakni perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, *rules of origin customs procedures and trade facilitation* (ROOCPTF), *cooperation and capacity building* (CCB), juga isu hukum dan kelembagaan. Pada perundingan ini juga ada sub *working group* mengenai teks perdagangan barang. Pada bulan Oktober ini akhirnya perundingan dari perwakilan Indonesia dan Korea Selatan secara substansial bisa dikatakan telah mencapai titik temu atau penyelesaian (Kementerian Perdagangan RI 2019).

Sebulan setelahnya, 25 November 2019, perundingan IK-CEPA dideklarasikan telah selesai oleh kedua negara. Kemudian, penandatanganan deklarasi ini ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI (Agus Suparmanto) dan Menteri Perdagangan Korea Selatan (Yoo Myung-Hee). Deklarasi tersebut dilakukan saat pihak Indonesia menghadiri KTT ASEAN-RoK *Commemorative Summit* di Busan, Korea Selatan. Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in juga menjadi saksi dari penandatanganan deklarasi bersama sehingga ini menjadi berita atau kabar baik bagi Indonesia dengan Korea Selatan dalam penandatanganan kerjasama IK-CEPA yang akan datang (Kementerian Perdagangan RI 2019).

Setelah finalisasi dari perundingan itu tercapai pada bulan Oktober 2019, kedua negara membuat teks perjanjian melalui proses terjemahan dan *legal scrubbing* (Kementerian Perdagangan RI 2019). Kemudian, untuk penandatanganan perjanjian IK-CEPA terlaksana pada tanggal 18 Desember 2020 di Seoul. Perjanjian ini disepakati dan resmi ditandatangani oleh Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Tanda tangan dari pihak Korea Selatan,

yaitu Sung Yun Mo selaku Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan (Kementerian Perdagangan RI 2020).

2.2. Perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan

Negosiasi antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement ini terdiri dari tiga pokok bahasan kerjasama yang sama pentingnya, yaitu perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerjasama ekonomi. Berfokus pada perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan. Perdagangan dalam IK-CEPA itu ada perdagangan barang dan perdagangan jasa. Perdagangan internasional penting dilakukan sebagai upaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dilihat dari GDP, yaitu *Gross Domestic Product* (GDP). Kita juga akan melihat perkembangan neraca perdagangan, ekspor, dan impor antara Indonesia dengan Korea Selatan.

2.2.1 Neraca Perdagangan, Ekspor, Impor antara Indonesia dengan Korea

Dengan melihat perkembangan ekspor dan impor dari beberapa tahun kebelakang kita akan dapat mengetahui yang namanya neraca perdagangan. Hal ini dapat membantu kita dalam melihat keadaan ekonomi di suatu negara itu surplus atau defisit perdagangan. Dalam menghitung neraca perdagangan itu dilakukan dengan cara nilai ekspor yang dikurangkan dengan nilai impor perdagangan. Apabila hasil perhitungan dari neraca perdagangan positif, maka pada tahun itu negara mengalami yang namanya surplus perdagangan. Kebalikannya, saat hasil perhitungan neraca perdagangan itu menghasilkan jumlah yang negatif, maka pada tahun tersebut negara mengalami yang namanya defisit perdagangan. Berikut akan ditampilkan data dari Badan Pusat Statistik

Indonesia yang mendata nilai ekspor-impor dan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Neraca Perdagangan Indonesia-Korea Selatan (Juta US\$)

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor	9.540,1	7.234,4	6.507,6	8.981,9	12.808,7
Impor	9.088,9	8.421,3	6.849,4	9.427,2	11.718,2
Total Perdagangan	18.629	15.655,7	13.357	18.409,1	24.526,9
Neraca Perdagangan	451,2	-1.186,9	-341,8	-445,3	1.090,5

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan itu sebesar USD 9,54 miliar dan nilai Impor Indonesia dari Korea Selatan itu sebesar USD 9,08 miliar. Melalui data ekspor-impor tersebut, maka dapat diperoleh total perdagangan dari kedua negara itu mencapai USD 18,62 miliar pada tahun 2018. Hasil perhitungan neraca perdagangan juga menunjukkan bahwa Indonesia surplus atau mendapatkan keuntungan dari perdagangan sebanyak USD 451,2 juta (Badan Pusat Statistik 2023). Beberapa komoditas Indonesia yang banyak dikirim ke Korea Selatan pada tahun tersebut ada batubara, bijih tembaga, getah karet, *plywood*, timah mentah, produk kayu, minyak kelapa sawit, dan bubur kertas. Sedangkan, komoditas yang paling diminati dan diimpor Indonesia dari Korea Selatan itu ada karet sintetis, lempeng besi baja, minyak bumi, kapal, elektronik *integrated circuits* (IC), dan kain tenun dari filamen sintetis (Kementerian Perdagangan RI 2019).

Kemudian, data yang terlihat dari tahun 2019 menunjukkan total perdagangan yang menurun dibandingkan tahun 2018. Total perdagangan tahun 2019 turun sekitar 15,96% dari total perdagangan tahun 2018 sehingga total perdagangan tahun 2019 hanya mencapai USD 15,65 miliar. Dengan nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar USD 7,23 miliar dan nilai impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar USD 8,42 miliar. Hasil perhitungan atau data neraca perdagangan pada tahun 2019 juga menunjukkan hasil yang negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia defisit sekitar USD 1,18 miliar (Badan Pusat Statistik 2023).

Pada tahun 2020, total perdagangan Indonesia kembali mengalami penurunan sebesar USD 2,29 miliar sehingga total perdagangan Indonesia tahun 2020 hanya sebesar USD 13,35 miliar. Dengan nilai ekspor Indonesia untuk Korea Selatan itu sebanyak USD 6,5 miliar dan nilai impor Indonesia dari Korea Selatan sebesar USD 6,84 miliar. Maka dari itu, neraca perdagangan antara Indonesia terhadap Korea Selatan juga menunjukkan nilai yang negatif atau defisit. Namun, defisit dari tahun 2020 ini tidak sebanyak pada tahun 2019. Terlihat bahwa defisit dari Indonesia pada tahun 2020 ini sekitar USD 341,8 juta (Badan Pusat Statistik 2023).

Nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 2021 itu sebesar USD 8,98 miliar dan nilai impor Indonesia dari Korea Selatan sebanyak USD 9,42 miliar. Dengan menambahkan nilai ekspor dan impor, maka kita dapat mendapatkan total dari nilai perdagangan pada tahun tersebut. Pada 2021 ini nilai ekspor dan impor mengalami kenaikan sehingga total perdagangan mencapai USD 18,4 miliar. Namun, nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor. Hal ini

membuat neraca perdagangan pada tahun tersebut juga defisit sebanyak USD 445,3 juta (Badan Pusat Statistik 2023).

Tahun terakhir dari tabel di atas merupakan tahun 2022 dan dari data yang ada di tabel terlihat bahwa nilai ekspor-impor Indonesia mengalami kenaikan. Nilai ekspor Indonesia ke Korea Selatan itu mencapai USD 12,8 miliar. Kemudian, nilai impor Indonesia dari Korea Selatan itu mencapai USD 11,71 miliar. Nilai ekspor Indonesia yang lebih tinggi membuat neraca perdagangan Indonesia terhadap Korea Selatan menjadi surplus dengan nilai mencapai USD 1,09 miliar. Selain itu, total perdagangan Indonesia dari nilai ekspor-impor ini terhitung sebesar USD 24,52 miliar (Badan Pusat Statistik 2023). Hal ini juga menjadi suatu keuntungan yang besar bagi Indonesia. Ini juga terjadi saat Korea Selatan telah berhasil meratifikasi perjanjian masuk menjadi kebijakan di dalam negerinya.

2.2.2 Perdagangan dalam IK-CEPA

Salah satu kesepakatan dari perundingan IK-CEPA menghasilkan suatu keputusan yang membahas mengenai perdagangan. Pada bahasan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perdagangan barang dan jasa. Dalam perdagangan barang perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan itu mencakup pembahasan-pembahasan, seperti *national treatment* (NT), pengurangan atau mengeliminasi tarif, akses pasar barang, ketentuan asal barang, *customs procedure*, *trade facilitation*, dan *trade remedies* (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2023). Ketentuan perdagangan barang yang berlaku di IK-CEPA itu komitmennya dalam mengeliminasi tarif terlihat lebih tinggi jika diperbandingkan dengan perjanjian Korea Selatan dalam ASEAN-Korea FTA

(AKFTA). Pada perjanjian AKFTA, eliminasi tarif perdagangan antara ASEAN dengan Korea Selatan itu sebesar 80% dari total tarif barang yang diperdagangkan oleh kedua belah pihak (Kementerian Perdagangan RI 2018).

Perjanjian IK-CEPA terlihat bahwa eliminasi tarifnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan AKFTA. Hal ini dikarenakan oleh Korea Selatan akan mengeliminasi tarifnya untuk Indonesia sebesar 95% dari total pos tarifnya. Sedangkan, Indonesia akan mengeliminasi tarif sebesar 92% dari total pos tarif untuk Korea Selatan. Yang kemudian, secara bertahap Korea akan mengeliminasi tarifnya untuk sekitar 3,4% dari total pos tarif yang dilakukan dalam rentang waktu 3 hingga 20 tahun setelah perjanjian ini telah diterapkan atau diaplikasikan. Beberapa produk dari Indonesia yang tarifnya dieliminasi oleh Korea Selatan ada *Lubricating Base Oils*, *Stearic Acid*, pakaian jadi, *Block board*, buah kering, dan rumput laut (Kementerian Perdagangan RI 2023).

Tidak hanya itu, IK-CEPA juga memberikan peluang kepada sektor perdagangan industri. Pihak industri dalam negeri dapat memiliki beragam pilihan bahan baku dalam *supply chain* sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia. Guna menyuplai kebutuhan global dalam *global value chains*. Sehingga IK-CEPA dapat mengembangkan teknologi, sumber daya manusia, juga perindustrian baik dalam bagian otomotif, elektronik, *f&b*, tekstil, dan sebagainya (Siagian 2022).

Selain perdagangan barang, terdapat pula yang namanya perdagangan jasa. Ketentuan atau komitmen dari kedua negara dalam perjanjian IK-CEPA pada sektor perdagangan jasa itu ada dengan berencana untuk membuka *market access* lebih dari 100 sub sektor jasa. Indonesia akan membuka sekitar 106 sub sektor

dan untuk Korea Selatan akan membuka sekitar 112 sub sektor. Dalam membuka beberapa sub sektor jasa tersebut akan dilakukan dengan menerapkan *Foreign Equity Participation* (FEP) hingga 100% (Siagian 2022).

Beberapa sub sektor dari jasa tersebut seperti jasa konstruksi, *engineering*, jasa yang mengenai komputer, dan audio visual. Kemudian, kedua negara juga akan melakukan yang namanya *future liberalization*. Pada beberapa sektor jasa, seperti di Indonesia itu dalam jasa konstruksi, legal, pos juga kurir dan di Korea Selatan itu dalam jasa konstruksi, waralaba (*franchise*), serta *computer related service*. Beberapa sektor jasa tersebut akan diliberalisasi di kemudian hari. Lalu, terdapat *movement of natural persons* yang mana kedua negara akan mencoba fasilitasi tiga gerakan, yakni *Intra-Corporate Transferees* (ICTs), *Business Visitors* (BVs), dan *Independent Professional* (IPs) (Siagian 2022). Tentunya ini dapat meningkatkan transfer teknologi yang berpengaruh kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.2.3 Perdagangan terhadap GDP

Grafik 1. Perdagangan Indonesia-Korea Selatan 2017-2022 dari GDP



Sumber: World Bank(n.d)

Grafik di atas merupakan grafik persentase perdagangan dari total GDP Indonesia dan Korea Selatan yang diinput mulai dari tahun 2017 hingga 2022.

Melihat dari grafik tersebut, persentase perkembangan nilai perdagangan dari GDP antara Indonesia dengan Korea Selatan sama-sama menunjukkan peningkatan pada tahun 2018. Salah satu yang mempengaruhinya adalah meningkatnya hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut menjadi hubungan diplomatik dalam *special strategic partnership*. Kemudian sempat menurun pada tahun 2019 dan 2020, ini dikarenakan mulai adanya pandemi. Setelah kesepakatan IK-CEPA disetujui oleh kedua belah pihak pada tahun 2020. Terlihat adanya kenaikan setelah adanya kesepakatan tersebut. Kemudian 2021 menuju 2022 perdagangan Korea Selatan lebih meningkat karena pada tahun 2021 Korea Selatan telah berhasil melakukan ratifikasi. Maka dari itu, penting untuk secepatnya Indonesia melakukan ratifikasi IK-CEPA.

Volume nilai perdagangan antara kedua negara ini menurun karena adanya pandemi. Namun, hal tersebut kian membaik sejalan dengan meningkatnya kerja sama antara kedua negara. Hingga saat perundingan perjanjian IK-CEPA telah mencapai kesepakatan pada tahun 2020 tidak serta merta membuat perjanjian ini dapat dikatakan berhasil. Perlu adanya kelanjutan pada level II tingkat domestik yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Yang mana, ini akan membuktikan keberhasilan dari perjanjian ini melalui adanya ratifikasi sehingga dapat diterapkan ke dalam negeri.

BAB 3

NEGOSIASI ULANG *INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE*

***ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* DALAM LEVEL DOMESTIK**

DAN *WIN-SETS*

Teori *Two-level Games*, yang terdiri atau dilihat dari dua aspek, seperti Level I pada tingkat internasional dan Level II pada tingkat domestik. Level II dari teori ini bisa diartikan sebagai kelanjutan dari level pertama (Internasional). Ini bisa berupa pembicaraan atau sosialisasi lebih lanjut mengenai hasil perundingan atau perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Namun, dalam teori ini hal tersebut belum cukup untuk dapat mengatakan bahwa perjanjian ini berhasil. Menurut teori *two level games*, perjanjian tersebut akan dikatakan berhasil apabila telah diratifikasi atau diadopsi di dalam negeri. Sehingga kedua aspek ini pun akan saling mempengaruhi, terikat, dan tidak terpisahkan. Beberapa hal pertimbangan dari level II atau domestik ini adalah proses ratifikasi IK-CEPA, para pemangku kepentingan, dan dampak dari kesepakatan IK-CEPA terhadap Indonesia yang dapat mendukung kepentingan Indonesia. Selain itu, terdapat *win-set* yang akan melihat bagaimana keberhasilan dari perjanjian kerja sama ini.

3.1 Dinamika Internasional saat perundingan ulang IK-CEPA

Perundingan ulang IK-CEPA yang berjalan selama delapan bulan sejak 19 Februari 2019 merupakan rentang perundingan yang cepat untuk diselesaikan. Apalagi pada akhir tahun 2019 merupakan awal mula pandemi *corona virus disease* 2019. Virus tersebut dengan cepatnya menyebar menjadi pandemi global

sehingga membuat banyak negara menerapkan *lock down*. Penyakit ini disingkat atau dikenal dengan nama Covid-19 yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2. Virus Covid-19 sendiri pertama kali masuk atau menjangkiti warga Indonesia pada 2 Maret 2020 (Rokom 2022).

Pada awal tahun 2020, virus tersebut dengan sangat cepat menyebar ke masyarakat Indonesia. Adanya pandemi ini masuk, membuat Indonesia juga menerapkan *lock down*. Hal ini turut mempengaruhi pekerjaan dan perputaran ekonomi di Indonesia. Banyak perusahaan yang gulung tikar atau membuat kebijakan pemecatan karyawan sehingga banyak masyarakat yang terdampak menjadi pengangguran. Saat adanya peraturan *lockdown* tersebut juga membuat banyak pekerjaan, belajar, dan beraktivitas dari rumah. Hal ini juga membuat pemakaian teknologi yang mumpuni juga sangat dibutuhkan. Bahkan, masyarakat banyak berbelanja dengan *market place* yang ada elektronik (belanja online). Pelonggaran pemakaian masker yang boleh tidak memakainya saat di luar ruangan itu dimulai pada pertengahan tahun 2022. Hal ini merupakan masa transisi, yang mana pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dan dapat mencoba melakukan upaya pemulihan ekonomi yang terdampak (Rokom 2022). Salah satunya dapat dilihat dari data ekspor-impor dari tahun 2019 hingga 2021 neraca perdagangan ekspor-impor antara Indonesia dengan Korea Selatan mengalami defisit. Hal ini dikarenakan Indonesia yang lebih banyak melakukan impor dari Korea Selatan.

Maka dari itu, perundingan IK-CEPA sebelum direaktivasi itu pada putaran terakhirnya tidak mencapai kesepakatan oleh keduanya. Indonesia menyetujui eliminasi tarif menjadi 0% saat Korea Selatan meningkatkan

investasinya. Namun, karena Korea Selatan belum dapat memastikan peningkatan investasi tersebut, maka perjanjian ini masih belum mencapai kesepakatan. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan perundingan IK-CEPA setelah reaktivasi. Pada dasarnya terdapat beberapa alasan yang membuat perjanjian IK-CEPA sangat diperlukan dan penting untuk disepakati oleh kedua negara. Indonesia dengan Korea Selatan sama-sama memiliki harapan yang tinggi terhadap IK-CEPA, seperti pemulihan perekonomian negara akibat dampak dari pandemi Covid-19. Juga terlihat dari Korea Selatan menerapkan kebijakan baru “*New Southern Policy*” yang dilakukan sebagai upaya menurunkan tingkat ketergantungan (interdependensi) negaranya terhadap negara-negara yang maju dengan memfokuskan kerja sama di kawasan Asia Tenggara dan India (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, n.d.).

3.2. IK-CEPA dalam Level Domestik

Telah selesainya perundingan ulang *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* membuat pada akhir tahun. Yang kemudian, setelah penandatanganan kesepakatan perjanjian IK-CEPA secara resmi pada akhir tahun 2020 merupakan awal dari perjalanan perjanjian ini untuk dapat diratifikasi dan diimplementasikan ke dalam negeri masing-masing. Beberapa pertemuan sosialisasi atau berupa webinar ada diadakan oleh beberapa *stakeholder*. Salah satunya ada dari kanal *youtube* Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam *Re-Orient Webinar Series* episode kelima yang membahas mengenai IK-CEPA yang merupakan salah satu upaya diplomasi ekonomi Indonesia di tengah adanya pandemi global. Hal ini ditujukan sebagai katalis pemulihan ekonomi Indonesia. Salah satu narasumber dari webinar tersebut adalah Ni Made Ayu Marthini yang

merupakan Direktur Perundingan Bilateral dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI 2021).

Gambar 4. Prosedur Ratifikasi IK-CEPA



Sumber: *Official Youtube Ministry of Foreign Affairs Indonesia* (2021)

Disampaikan bahwa setelah perjanjian ditandatangani, Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan kepada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dokumen yang akan dilampirkan saat menyampaikan mengenai perjanjian tersebut, seperti *certified true copy*, terjemahan, dan naskah pertimbangan. Penyampaian perjanjian tersebut pertama kali disampaikan oleh Menteri Perdagangan kepada Menteri Luar Negeri. Hal ini disampaikan maksimal 40 hari setelah penandatanganan perjanjian kesepakatan kerja sama. Kemudian, Menteri Luar Negeri akan meneruskan untuk menyampaikannya kepada Presiden. Penyampaian ini dilakukan melalui Sekretariat Negara (Kementerian Luar Negeri RI 2021).

Presiden menyampaikannya kepada DPR maksimal 90 hari setelah penandatanganan perjanjian kesepakatan kerja sama. Kemudian, DPR akan memberikan keputusan mengenai ratifikasi ini akan diatur melalui peraturan presiden (Perpres) saja atau juga disertakan Undang-Undang (UU). Keputusan hasil dari konsultasi DPR ini maksimal 60 hari kerja setelah DPR menerima penyampaian dari Presiden. Setelah ditetapkan peraturan yang mengikatnya,

maka akan dilanjutkan penerbitan regulasi menteri (PMK) dan juga SKA (Kementerian Luar Negeri RI 2021). Presiden menyampaikan mengenai IK-CEPA kepada DPR RI dilakukan dengan menggunakan Surat Presiden. Surat tersebut dibuat 12 April 2021 dengan nomor R-16/PRES/04/2021. Yang kemudian, Surat Presiden tersebut sampai atau diterima keesokan harinya oleh DPR RI (Siagian 2022).

Pada kegiatan rapat kerja antara Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Muhammad Lutfi, bersama DPR RI di Jakarta membahas mengenai rencana-rencana kerja kedepannya. Salah satu dari rencana kerja tersebut adalah dengan disetujuinya perjanjian atau kesepakatan IK-CEPA oleh Komisi VI DPR RI. Pada saat itu, Mohamad Hekal yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV membacakan kesimpulan rapat kerja. Yang mana, IK-CEPA disetujui oleh DPR RI dan untuk pengesahannya akan diatur melalui Undang-Undang. Persetujuan ini dilakukan sesuai dasar hukum mengenai perdagangan internasional, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Ratifikasi dari perjanjian kerja sama IK-CEPA ini direncanakan akan disahkan serta diberlakukan pada tahun 2022 (Nasution 2021).

Dengan berhasilnya kesepakatan IK-CEPA ini mendapatkan persetujuan dari DPR RI, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU). Pada 5 Juli 2022, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang merupakan Menteri Perdagangan RI sejak tahun 2022 menghadiri Rapat Kerja (Raker) Tingkat I Komisi VI DPR RI yang dilaksanakan di Jakarta. Raker tersebut membahas mengenai RUU yang mengatur tentang pengesahan kerja sama ekonomi komprehensif dalam lingkup regional (RCEP) dan IK-CEPA. Banyak dukungan terhadap RUU ratifikasi perjanjian IK-CEPA yang disampaikan oleh

fraksi-fraksi dalam Raker tingkat I ini dapat membuat raker ini menuju tingkat selanjutnya yang dikenal dengan rapat paripurna. Namun, dukungan dari Komisi VI DPR RI ini juga memberikan sedikit catatan pendapat mereka terhadap ratifikasi perjanjian IK-CEPA (Kementerian Perdagangan RI 2022).

Penetapan atau ratifikasi dari rancangan tersebut dibicarakan lagi kedalam pembahasan tingkat II yang disebut Rapat Paripurna DPR RI untuk mengesahkan rancangan tersebut menjadi Undang-Undang (UU). Rapat Paripurna DPR RI yang membahas mengenai pengesahan ini dilaksanakan pada 30 Agustus 2022 di Gedung Nusantara II (Gedung DPR RI), Jakarta. Rapat tersebut dipimpin oleh Lodewijk F. Paulus yang merupakan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Beliau bertanya mengenai kesepakatan dalam mengesahkan RUU IK-CEPA menjadi UU kepada semua peserta atau fraksi rapat tersebut. Setelah mendapat persetujuan oleh semua Fraksi DPR RI, Beliau pun melakukan ketuk palu (DPR RI 2022).

Martin Manurung yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI menjelaskan secara singkat bahasan dari perspektif-perspektif Fraksi yang ada di Raker Tingkat I lalu yang pada saat itu juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri RI. Pembahasan selanjutnya akan membicarakan tentang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang meliputi batang tubuh sebanyak 17 DIM dan penjelasan mengenai RUU IK-CEPA sebanyak 10 DIM. Harapan tinggi terhadap perjanjian IK-CEPA ini sebagai salah satu upaya dalam memulihkan perekonomian Indonesia setelah adanya pandemi Covid-19. Terbukanya akses pasar bagi kedua negara sehingga membuat produk

Korea Selatan yang masuk ke dalam negeri itu tidak boleh ada diskriminasi (DPR RI 2022).

Maksudnya, dalam memperlakukan produk impor dari Korea Selatan harus sama seperti kita memperlakukan produk lokal. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk mempersiapkan para pelaku usaha dalam negeri untuk dapat berkontribusi dan tidak kalah saing terhadap produk Impor. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memberikan jaminan perlindungan terhadap barang atau produk nasional dan UMKM, memaparkan serta menerangkan lebih lanjut kepada semua pelaku usaha dalam negeri mengenai perjanjian IK-CEPA. Dalam perizinan usaha itu birokrasi ataupun sistematis yang harus dilakukan para pelaku usaha sebisanya dipermudah, dibuat dengan lebih sederhana, dan efisien (DPR RI 2022).

Pada akhirnya, Ratifikasi RUU IK-CEPA menjadi Undang-Undang itu disahkan atau mulai berlakunya UU mengenai perjanjian tersebut pada 27 September 2022. Disahkannya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan itu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 (JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI 2022). Setelah dilakukannya ratifikasi perjanjian, terdapat aturan mengenai regulasi atau ketentuan dari kementerian perdagangan yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2022. Peraturan ini membahas aturan-aturan mengenai ketentuan asal barang Indonesia, regulasi penerbitan dokumen keterangan asal barang terhadap barang yang berasal dari Indonesia (Kementerian Perdagangan RI 2022).

Peraturan tersebut ditetapkan oleh Menteri Perdagangan RI (Zulkifli Hasan) pada 16 Desember 2022, yang secara sah dijadikan undang-undang dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan oleh Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna H. Laoly) pada 22 Desember 2022, dan dalam pengimplementasian peraturan ini akan diberlakukan pada 1 Januari 2023. Melalui Permendag inilah Indonesia mendapatkan eliminasi tarif dari Korea Selatan sebanyak 95,5% dari total pos tarifnya. Sedangkan, *market share* atau *demand* dari Korea Selatan itu sebanyak 97,33% (Kementerian Perdagangan RI 2022). Melihat dari adanya aturan lebih lanjut mengenai regulasi dari perdagangan kerja sama ini menjadi salah satu bukti nyata dari upaya mempersiapkan Indonesia untuk dapat memanfaatkan kerja sama komprehensif ini dengan sebaik mungkin. Namun, dalam memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari perjanjian ini tidak hanya memerlukan dari upaya pemerintah saja. Perlu dukungan dan aksi nyata dari segala pihak, baik itu pemerintah, pelaku usaha, dan juga UMKM.

3.2.1 Pemangku atau kelompok kepentingan

Dalam menilai kepentingan dalam domestik, perlu dilihat dari beberapa aktor yang tentunya ada di dalam negeri tersebut. Dengan melihat hal ini dapat membantu pemahaman terhadap tekanan politik domestik yang mengukur urgensi dari kerja sama ini. Pemangku ataupun kelompok kepentingan tersebut pun dapat membantu perjanjian IK-CEPA dan besaran analisis win-set nantinya. Beberapa aktor pemangku kepentingan tersebut akan dilihat dari:

a. Pemerintah Indonesia

Pengaruh atau dampak dari pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Dikarenakan ini merupakan

pandemi global yang juga mempengaruhi kondisi ekonomi global, terutama Indonesia yang masih merupakan negara berkembang. Maka dari itu, diplomasi ekonomi sangat diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat mendorong ataupun mengupayakan ekonomi yang lebih baik (Santoso and Dewi 2022, 354). Selain itu, diplomasi termasuk kedalam fokus utama politik luar negeri Indonesia yang menggunakan diplomasi 4+1, yaitu menguatkan diplomasi ekonomi, perlindungan, kedaulatan dan kebangsaan, upaya atau kinerja Indonesia di ranah regional-global, serta meningkatkan infrastruktur diplomasi. Kemudian, salah satu dari beberapa strategi Indonesia dalam menguatkan diplomasi ekonomi di ranah G20 adalah dengan memperkuat perundingan mengenai perdagangan dan investasi, tak terkecuali salah satunya adalah dengan berkomitmen di dalam perundingan kerja sama IK-CEPA. Tak hanya itu, Pak Jokowi juga berpesan kepada para diplomat untuk selalu menunjukkan citra dan potensi Indonesia pada setiap pertemuan Indonesia dengan negara lain sebagai upaya meningkatkan potensi kerja sama dan investasi masuk ke dalam negeri (Astuti and Fathun 2020, 62).

Ni Made Ayu Marthini yang merupakan Direktur Perundingan Bilateral dari Kementerian Perdagangan dalam sosialisasinya di Re-Orient Webinar Series Episode 5. Webinar ini mengusung bahasan IK-CEPA yang merupakan Diplomasi Indonesia di Tengah Pandemi dan menyampaikan saat pertemuan yang melakukan penentuan produk-produk yang dapat atau memiliki potensi untuk diekspor ke Korea Selatan itu. Kementerian Perdagangan Indonesia sangat berpikir keras untuk produk

apalagi yang dapat memperluas akses pasar atau keuntungan kita. Cerita yang sering diperbincangkan oleh beliau (yang paling berkesan bagi beliau saat melakukan perundingan) adalah pada saat itu Indonesia ada menawarkan untuk mengekspor salak (Kementerian Luar Negeri RI 2021).

Namun, pihak dari Korea Selatan menolaknya karena mereka tidak mengetahui apa itu salak. Pada saat jam makan malam, Indonesia menyajikan salah satu buah-buahan yang belum pernah diketahui atau dirasakan oleh delegasi Korea Selatan. Tak disangka, cita rasa dari salak tersebut justru diterima baik oleh lidah delegasi Korea Selatan. Maka dari itu, salak akhirnya juga termasuk dalam produk yang diekspor dan menjadi salah satu produk yang berpotensi meningkat untuk diekspor ke Korea Selatan bersama dengan rumput laut juga durian (Kementerian Luar Negeri RI 2021).

Setelah selesai secara substansi dan segala urusan mengenai *legal scrubbing* juga terjemahan menurut bahasa Indonesia dan Hangeul (Korea Selatan), penandatanganan kesepakatan perundingan kedua belah pihak yang dilaksanakan pada 18 Desember 2020. Selanjutnya, hal ini akan masuk ke tahap ratifikasi. Namun, pada tanggal 29 Juni 2021 Korea Selatan telah berhasil atau selesai melakukan ratifikasi perjanjian IK-CEPA ini (Siagian 2022). Ini akan membuat tuntutan atau tekanan kepada pemerintah untuk segera meratifikasi perjanjian ini ke dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Agar tercapainya kepentingan Indonesia untuk segera mengimplementasikannya dan memanfaatkan kerja sama

kemitraan yang komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai pemulihan atau peningkatan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka meratifikasi ke dalam negeri, dilakukannya rapat kerja Tingkat I DPR RI mengenai perjanjian IK-CEPA. Terdapat penilaian dari, Andre Rosiade, perwakilan atau anggota Fraksi Gerindra di Komisi VI DPR RI. Beliau sepakat dan mendukung perjanjian ini untuk diratifikasi. Hal ini dikarenakan Beliau menilai adanya IK-CEPA itu akan membawa hal positif (kepentingan yang baik) bagi hubungan kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan, terutama dalam sektor perdagangan. Kemudian, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi anggota Komisi VI (Nasim Khan) juga mempertegas pernyataan agar dengan adanya IK-CEPA dapat membuat *bargaining power* perdagangan internasional Indonesia menjadi lebih kuat lagi (Nasution 2021).

Dalam Raker Tingkat I Komisi VI DPR RI yang mengusung bahasan pembuatan RUU mengenai RCEP dan IK-CEPA, DPR RI menegaskan bahwa dalam ketentuan menghapus hambatan tarif dan non-tarif itu tidak serta merta menghilangkan sertifikasi ketentuan halal yang diterapkan pada produk yang masuk dari Korea Selatan. Komisi VI ini juga mengatakan apabila pengesahan IK-CEPA ini telah selesai, diharapkan adanya sosialisasi, aksi nyata, dan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk terus membantu para pelaku usaha sehingga mereka dapat memanfaatkan adanya perjanjian ini dengan baik serta efisien (Kementerian Perdagangan RI 2022). Terdapat tekanan, tuntutan atau dorongan dari beberapa fraksi kepada Pemerintah RI. Beberapa fraksi

tersebut antara lain PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, dan PAN.

Perwakilan Fraksi PDIP yang ada di DPR RI, Evita Nursanty, berharap pemerintah dapat segera membuat strategi besar dan rencana aksi kedepannya untuk membantu memasuki *market* dan *branding* produk atau UMKM Indonesia di Korea Selatan. Lalu, perwakilan dari Golkar (Budhy Setiawan) mendukung pengesahan ini karena menurut mereka perjanjian ini sangat urgensi bagi kedua negara. Hal ini dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia karena terbukanya peluang lapangan pekerjaan. Terbukanya peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia ini dipicu dari adanya target dari Korea Selatan yang membuat Indonesia sebagai *new production base* yang dapat membuka peluang investasi masuk juga adanya pabrik baru nantinya (DPR RI 2022).

Dilanjut oleh Khilmi yang merupakan perwakilan Fraksi Gerindra yang berharap IK-CEPA ini dapat meningkatkan peluang *global value chains* yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Hal ini dikarenakan kedua negara pastinya memiliki produk unggulan masing-masing. Dari juru bicara (jubir) Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun, sepakat dengan RUU pengesahan IK-CEPA ini dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dan mengajak semua pihak untuk mendukung sehingga kesepakatan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan Indonesia dengan Korea Selatan menjadi lebih baik dan meningkatkan ekonomi pembangunan masing-masing negara (DPR RI 2022).

Tommy Kurniawan selaku perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menyampaikan bahwa IK-CEPA merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi hambatan perdagangan antara kedua negara dan meningkatkan profit negara. Berbeda dari yang lain, pandangan Fraksi Demokrat disampaikan oleh Ketua Kelompok Fraksinya langsung, yaitu Herman Khaeron. Beliau berpendapat adanya IK-CEPA ini dapat berguna menjadi wadah yang juga melindungi *national interest*-nya. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia dapat meningkat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fraksi Demokrat (DPR RI 2022).

Juru bicara Fraksi PKS, Nevi Zuairina, turut menjelaskan adanya IK-CEPA akan membuat ekspor Indonesia meningkat yang ujungnya neraca perdagangan Indonesia akan menunjukkan nilai yang positif (surplus). Tambahan, mengenai sertifikasi halal harus selalu diperhatikan. Penutup dari ini, Intan Fauzi sebagai jubir dari Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mengharapkan dengan kelancarannya ratifikasi IK-CEPA ini dapat membuat peningkatan yang besar bagi ekonomi di Indonesia. Peningkatan baik itu dalam *market access*, perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan sebagainya sebagai langkah atau upaya memulihkan ekonomi yang ada di Indonesia (DPR RI 2022).

Mendag RI Zulkifli Hasan mendukung penuh ratifikasi RUU IK-CEPA menjadi UU untuk dapat mempercepat pemanfaatan dan pengimplementasian kerja sama ini. Bahkan, Beliau optimis terhadap nilai ekspor tahun ini akan meningkat pesat. Dengan meningkatnya nilai ekspor

dapat membuat probabilitas neraca perdagangan menjadi positif dan ini akan membuat stimulus yang baik terhadap memulihkan dampak ekonomi dari Covid-19. Selain itu, ini dapat membangun citra baik Indonesia yang akan membawa banyak investasi masuk ke dalam negeri juga memperluas akses Indonesia dalam hal *Global Value Chains*. Adanya IK-CEPA ini memperlancar hubungan perdagangan dari kedua negara sehingga alur transfer teknologi akan semakin lancar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia (Kementerian Perdagangan RI 2022).

b. Pelaku Usaha

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merupakan suatu ruang organisasi bagi para pengusaha yang ada di Indonesia. KADIN ini dapat membantu para pengusaha untuk tetap mengetahui informasi terkini mengenai segala hal yang berhubungan dengan perekonomian, perdagangan, dan investasi. Maka dari itu, KADIN berperan sebagai perantara dari para pengusaha yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia yang mengharuskannya untuk bersikap adaptif (Pemerintah Aceh 2022).

KADIN juga ada mengikuti atau menghadiri salah satu perundingan IK-CEPA. KADIN Indonesia juga bertanggung jawab dalam meningkatkan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Korea Selatan. Arsjad Rasjid yang mengemban tugas sebagai Ketua Umum KADIN Indonesia sempat menyampaikan pendapat saat pertemuan bisnis Presidensi G20-B20 pada 28 Juli 2022 bersama dengan beberapa pebisnis Korea Selatan. Beliau menyampaikan pendapat mengenai adanya

peningkatan perdagangan yang signifikan dari kedua negara yang tersebut sejak penandatanganan IK-CEPA ditambah dengan adanya Omnibus Law. Nilai total perdagangan meningkat hingga kurang lebih sekitar 40%, yaitu pada tahun 2021 mencapai hingga USD 18,4 miliar dan pada tahun 2022 mereka mencoba untuk menetapkan target akan meraih total perdagangan sebesar USD 20 miliar (Riswan 2022).

Melihat penandatanganan tersebut rupanya akan membuat hubungan antara Indonesia dengan Korea Selatan yang telah lama terjalin dengan baik menjadi lebih baik lagi. Bahkan, ada peningkatan total perdagangan pada tahun 2021. Walaupun, jika dilihat dari tabel 2 masih menunjukkan defisit. Namun, pada tahun berikutnya (2022) rupanya *goals* yang ditargetkan oleh Ketua KADIN Indonesia berhasil tercapai dengan sangat baik. Ini ditunjukkan dari data tabel 2 yang berasal dari Badan Pusat Statistik dengan total perdagangan ekspor-impor itu mencapai USD 24 miliar.

Selain dari KADIN Indonesia, juga ada wadah perkumpulan bagi eksportir dan yang ingin memulai menjadi eksportir. Perkumpulan ini disebut dengan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (GPEI DIY) dan ini merupakan salah satu asosiasi dari KADIN Indonesia itu sendiri. Asosiasi ini memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia terkhusus pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dikatakan sebagai pilar ekonomi kerakyatan (GPEI DPD DIY 2021). Pada tanggal 18 Maret 2021, GPEI DIY ada mengadakan sebuah webinar yang membahas mengenai persiapan-

persiapan yang diperlukan untuk mengekspor produk makanan dan minuman (mamin) ke Korea Selatan. Yang diharapkan dengan adanya webinar ini akan meningkatkan pangsa pasar (*market share*) mamin Indonesia (Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul 2021).

Tanggapan GPEI dari adanya reaktivasi perundingan IK-CEPA yang telah mencapai kesepakatan oleh Indonesia dan Korea Selatan adalah desakan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan informasi atau pemahaman kepada para eksportir mengenai hasil perundingan IK-CEPA. Benny Soetrisno selaku Ketua Umum GPEI menyampaikan bahwa hal tersebut sangat penting untuk dilakukan. Dengan semakin banyaknya eksportir yang memahami manfaat dari adanya kerja sama IK-CEPA, maka ini akan meningkatkan kinerja para eksportir. Lalu, pemahaman yang paling tepat untuk diberitahukan kepada para eksportir adalah mengenai pos-pos tarif yang akan dieliminasi (Wahyudi 2021).

3.2.2 Dampak keberhasilan perundingan IK-CEPA bagi Indonesia

Dari adanya IK-CEPA tentunya akan membawa dampak positif dan bisa juga tidak dapat meningkatkan perdagangan. Walaupun kebijakan kerja sama IK-CEPA diterapkan di Indonesia, Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) merasa eliminasi tarif produk yang diekspor oleh Indonesia ke Korea Selatan ini tidak akan membawa perubahan. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan jenis produk ekspor-impor dari sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Hal tersebut disampaikan oleh Redma Gita Wirawasta yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) APSyFI. Beliau mengatakan industri TPT Indonesia

kebanyakan mengekspor ke Korea Selatan itu hanya dalam bentuk bahan baku dasarnya saja salah satu contohnya adalah benang pintal. Yang nantinya, di Korea Selatan ini akan diolah menjadi barang jadi dan selanjutnya diekspor kembali oleh Korea Selatan kepada Indonesia dan beberapa negara lainnya. Ini tidak akan membuat neraca perdagangan dari industri TPT meningkat karena nilai ekspor dan impor itu mempengaruhi neraca perdagangan. Apabila kita terus menyuplai bahan bakunya dan mengimpor hasil dari proses bahan baku tersebut, tentunya nilai dari impor akan lebih banyak sehingga dapat membuat neraca perdagangan tetap defisit (Wahyudi 2021).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI juga menyadari mengenai banyaknya produk impor tekstil (barang jadi) yang masuk ke pasar domestik. Maka dari itu, pemerintah mengantisipasinya dengan membuat kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN). Selain itu, Kemenperin juga berusaha mulai melakukan kebijakan hilirisasi industri pada beberapa basis sektor, yaitu agro, bahan tambang & mineral, juga migas & batubara. Beberapa basis sektor tersebut akan mulai dilakukan secara bertahap terkait pengurangan mengekspor dalam bentuk mentah. Walaupun pada sektor industri TPT terjadi defisit karena maraknya produk impor, industri manufaktur justru meningkat sesuai dengan meningkatnya *demand* pasar. Data pada Juni 2023 dari S&P Global mengenai Purchasing Managers Index (PMI) industri manufaktur Indonesia itu mencapai level 52,5. Industri manufaktur Indonesia ini meningkat karena pada bulan sebelumnya hanya mencapai level 50,3. Sedangkan, Korea Selatan itu berada di level 47,8. Peningkatan level PMI manufaktur ini membuat pemikiran

dan kepercayaan diri para pelaku usaha industri menjadi meningkat sehingga kinerja mereka juga lebih terpacu (Kementerian Perindustrian RI 2023).

Kemudian dari terjalin dan diterapkannya perjanjian kerja sama IK-CEPA ini memiliki beberapa keuntungan bagi kedua belah pihak, seperti adanya eliminasi tarif ekspor-impor dan meningkatkan perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi antara kedua negara. Yang akhirnya, dapat menambah kualitas dari sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Akses pasar yang juga semakin meluas dari produk sepeda, sepeda motor (termasuk *spare part*), olahan ikan, salak, hingga industri tekstil (Kementerian Perdagangan 2023). Menteri Perdagangan RI melakukan pertemuan tersendiri dengan MOTIE Korea Selatan saat pertemuan menteri perdagangan, investasi, dan industri yang dilaksanakan pada 21 September 2022 di Bali, Indonesia. Kedua menteri perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan ini membahas mengenai persiapan regulasi atau aturan-aturan dalam menerapkan perjanjian IK-CEPA tersebut. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 2023 terhitung berjalan selama 50 tahun dan dengan diterapkannya IK-CEPA merupakan salah satu langkah upaya mempererat hubungan kedua negara (Kementerian Perdagangan 2022).

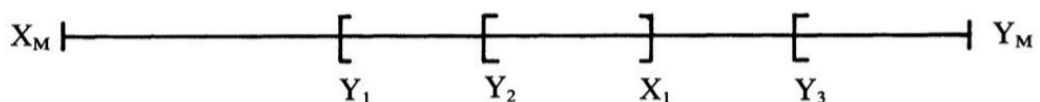
Dengan hubungan kedua negara yang lebih erat juga ditunjukkan dari adanya penandatanganan sebanyak tiga *Memorandum of Understanding* (MoU) bisnis yang dilakukan pada 23 September 2022. Penandatanganan ini dapat membuat probabilitas transaksi antara kedua negara akan mencapai sekitar USD 7 juta dengan rincian transaksi sebesar USD 2 juta untuk masing-masing PT Satoria Konjac Industri (Tepung konjak atau porang) dan PT Indorasa Utama (Keripik singkong) yang bertransaksi dengan With Us Co.,LTD. Kemudian, ada

probabilitas transaksi sekitar USD 3 juta untuk PT Seed Origin International (Olahan ubi) dengan Wellygo Inc. Maka dari itu, produksi yang paling diminati oleh Korea Selatan dari Indonesia adalah konjak atau porang, olahan singkong, dan ubi (Kementerian Perdagangan 2022).

3.3. *Win-set Two-Level Games*

Pada penjelasan mengenai *win-set* dari teori ini ada terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Dari buku “*Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*” karya Robert D. Putnam, kita hanya mengetahui bahwa ada dua aspek variabel yang dapat menentukan keberhasilan dari teori ini, yaitu aspek Internasional (Level I) dan aspek Domestik (Level II). Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hubungan variabel X-Y terhadap pihak yang berkepentingan di Level I dan II. Maka dari itu, dalam penelitian ini variabel X akan melambangkan Korea Selatan dan variabel Y akan melambangkan Indonesia. Berikut ada gambar pemetaan kepentingan dalam melihat *win-set* (Putnam 1988).

Gambar 5. Pemetaan Kepentingan dalam *win-set*



Sumber: Putnam (1988)

Melihat kepentingan dari perundingan ulang IK-CEPA meraih titik temu dapat dijelaskan dengan pemetaan tersebut. Titik X_M merupakan kepentingan maksimum dari Korea Selatan. Titik Y_M merupakan kepentingan maksimum Indonesia. Sempat terhentinya IK-CEPA pada tahun 2014 dan mulai dijalankan lagi perundingannya pada tahun 2019. Hal ini membuat kepentingan maksimum dari kedua negara adalah tercapainya kesepakatan perjanjian IK-CEPA.

Kemudian, titik X_1 merupakan kepentingan minimum Korea Selatan. Titik Y_1 merupakan kepentingan minimum Indonesia. Kepentingan minimum Korea Selatan adalah meningkatkan ekonomi pasca *Covid-19* dan penerapan kebijakan *new southern policy* Presiden Moon Jae-in. Sedangkan, kepentingan minimum Indonesia adalah meningkatkan ekonomi pasca *Covid-19* dan menjalin hubungan yang lebih erat setelah adanya kemitraan *special strategic partnersip* dengan Korea Selatan.

Titik Y (perjanjian IK-CEPA) dapat berada pada titik Y_2 ataupun Y_3 . Hal ini tergantung dari berhasil atau tidaknya perjanjian. Perundingan perjanjian IK-CEPA setelah reaktivasi (tahun 2019-2022) menunjukkan bahwa perjanjian ini berhasil. Tepatnya, pada perundingan kesepuluh kesepakatan akhirnya dapat tercapai dan ini merupakan bukti nyata dari pemetaan kepentingan titik Y apabila diletakkan pada Y_2 . Kesepakatan ini terjadi karena kedua belah pihak sama-sama dapat mendapatkan keuntungan, seperti eliminasi tarif ekspor-impor dan meningkatkan perekonomian pasca *Covid-19*. Selain itu, adanya kebijakan *new southern policy* dari Korea Selatan yang ikut mendukung terjalinnya kemitraan ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dengan Korea Selatan. Dalam penyesuaian investasi pun perusahaan asal Korea Selatan dan perwakilan KADIN Indonesia yang mengikuti perundingan juga ikut andil. Walaupun bagi Indonesia ini masih belum membuat perubahan pada industri tekstil. Namun, adanya IK-CEPA masih memiliki banyak dampak positif bagi ekonomi dan sektor di Indonesia.

IK-CEPA yang sempat terhenti pada tahun 2014 itu merupakan perumpamaan dari titik Y apabila ada pada titik Y_3 . Yang mana, pada saat itu

Indonesia ada menanyakan terkait peningkatan investasi yang akan dilakukan oleh Korea Selatan. Salah satunya dalam bidang elektronik. Namun, Korea Selatan tidak dapat menyetujuinya. Ini dikarenakan oleh partai konservatif yang memihak *chaebol* sehingga dalam memutuskan kerja sama, pemerintah lebih selektif dalam mempertimbangkan keuntungan atau kerugiannya ini merupakan salah satu pemetaan dari titik X_1 . Kemudian, titik Y_1 pada pemetaan tahun 2014 tersebut dilihat dari eliminasi tarif perdagangan barang sepenuhnya karena apabila tarifnya dieliminasi produk Indonesia dapat kalah saingnya dengan produk Korea Selatan (Hariyanti 2014). Maka dari itu, titik Y berada pada titik Y_3 karena Indonesia menyetujui eliminasi tarif dengan syarat peningkatan investasi. Namun, hal tersebut tidak dapat meraih kesepakatan.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perundingan *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) merupakan upaya antara kedua negara untuk menjalin kerja sama dengan lebih erat lagi. Dalam menganalisis keberhasilan IK-CEPA dalam sektor perdagangan dengan sudut pandang Indonesia menggunakan teori *two-level games* adalah dengan melihat dua aspek yang ada pada teori ini. Dua aspek tersebut ada Level I dan II yang masing-masing level tersebut merupakan aspek internasional dan domestik. Komitmen kedua negara untuk melanjutkan kembali perundingan ini dilakukan pada 19 Februari 2019. Terkait perundingan juga berjalan dengan sangat cepat hanya membutuhkan tiga kali perundingan yang pada putaran kesepuluh meraih kesepakatan. Ini juga dikarenakan adanya pandangan ASEAN yang memiliki prinsip keterbukaan dan menghormati hukum internasional dalam hal meningkatkan kerja sama.

Dalam beberapa pertemuan, kedua negara juga menghadirkan para pelaku pengusaha Korea Selatan dan organisasi yang membantu memberikan informasi kepada para pelaku usaha di Indonesia (KADIN Indonesia). Dalam melakukan perundingan kebanyakan dari putaran perundingan melakukannya dengan cara membagi menjadi beberapa kelompok kerja. Perundingan ini telah selesai secara substansial pada bulan Oktober 2019 dan penandatanganan kerja sama dilakukan pada 18 Desember 2019. Tiga pokok bahasan penting kerja sama IK-CEPA ini adalah mengenai perdagangan barang dan jasa, investasi, juga kerja sama

ekonomi. Fokus penelitian ini proses keberhasilan IK-CEPA dalam sektor perdagangan. Perdagangan internasional merupakan salah satu hal yang dapat menambah perekonomian negara sehingga adanya IK-CEPA ini dapat meningkatkan GDP negara. Yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi itu adalah nilai ekspor dari perdagangan. Hal ini dikarenakan nilai ekspor yang lebih besar akan membuat neraca perdagangan menjadi surplus.

Ditambah pada tahun 2021, Korea Selatan telah selesai melakukan ratifikasi. Inilah yang mempengaruhi neraca perdagangan pada 2021 masih mengalami defisit. Maka dari itu, Indonesia harus secepatnya meratifikasi perjanjian tersebut untuk dapat menerapkannya ke dalam negeri. Komoditas Indonesia yang menjadi favorit diekspor ke Korea Selatan ada batubara, getah karet, timah mentah, benang pital, dan sebagainya. Namun, apabila hal ini dikirim dalam bentuk bahan baku dan kita kembali mengimpor hasil olahan dari bahan baku tersebut dapat membuat selisih dari harga ekspor-impor menjadi defisit. IK-CEPA memiliki keuntungan yang lebih daripada AKFTA karena eliminasi pos tarif IK-CEPA lebih tinggi. Yang mana, Indonesia akan mengeliminasi tarif sebanyak 92% dari total pos tarifnya dan Korea Selatan akan mengeliminasi sebesar 95% dari total pos tarifnya. Dalam mempererat hubungan diplomatik ataupun menjalin suatu kerja sama itu akan meningkatkan GDP negara yang melakukan kerja sama tersebut.

Apalagi ditambah adanya pandemi global yang membuat seluruh negara di dunia ikut terdampak, termasuk perdagangan dan perekonomian negara. Ini merupakan tambahan tuntutan untuk memulai hubungan kerja sama ekonomi sebagai upaya memulihkan perekonomian negeri (Indonesia). Begitupun dengan

Korea Selatan. Namun, dibalik hal tersebut Korea Selatan juga berupaya melepaskan interdependensi terhadap negara-negara maju dengan kebijakan *New Southern Policy*.

Keberhasilan perundingan kerja sama IK-CEPA dengan menggunakan teori ini dilihat hingga kerja sama ini berhasil diratifikasi oleh kedua negara. Yang pada awalnya, Korea Selatan lebih dulu melakukan ratifikasi pada 29 Juni 2021. Lamanya Indonesia melakukan ratifikasi juga dipengaruhi dengan banyaknya regulasi yang harus dilakukan. Regulasi ratifikasi dilakukan oleh penyampaian dari Mendag ke Menlu lalu Presiden. Hingga pada akhirnya, Presiden menyampaikannya ke DPR, menunggu keputusan DPR, penetapan aturannya, dan menerbitkan regulasi menteri. Perjanjian IK-CEPA berhasil diratifikasi dari Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 pada 27 September 2022. Kemudian, regulasi dari kementerian yang mengatur mengenai ketentuan barang itu masuk ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2022 pada 16 Desember 2022.

Dapat terlihat bahwa kerja sama IK-CEPA telah berhasil diraih untuk dilakukan bersama. Awalnya level internasional melakukan perundingan hingga menghasilkan kesepakatan. Lalu, kesepakatan kerja sama ini harus sama-sama diratifikasi dan diterapkan dulu di dalam negeri baru dapat dikatakan perjanjian yang berhasil. Inilah yang dimaksud pada level domestik. Kedua level ini juga dapat mempengaruhi seberapa besar *win-set* perundingan IK-CEPA meraih kesepakatan yang kemudian akan dilakukan proses ratifikasi. Di Indonesia sendiri ketentuan dari IK-CEPA ini akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2023. Inilah yang membuat perjanjian IK-CEPA dikatakan telah berhasil. Walaupun, juga ada

yang tidak terpengaruh dari adanya IK-CEPA misalnya industri tekstil. Namun, masih banyak keuntungan lainnya yang dapat menguntungkan Indonesia sehingga neraca perdagangan pada 2022 mengalami surplus. Diharapkan untuk kedepannya neraca perdagangan Indonesia akan mengalami peningkatan lagi.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini tentunya masih bisa dikembangkan lagi kedepannya. Rekomendasi penelitian selanjutnya juga bisa membahas mengenai keberhasilan penerapan IK-CEPA setelah secara resmi diimplementasikan awal tahun 2023. Hal ini juga bisa lebih dispesifikkan, misalnya keberhasilan penerapan IK-CEPA yang dilihat dalam parameter ekonomi. Selain itu, bisa juga dilihat dalam parameter salah satu dari tujuan yang ada di *Sustainable Development Goals* (SDGs).

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Astuti, Wiwiek R., and Laode M. Fathun. 2020. "DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI DALAM REZIM EKONOMI G20 PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO." *INTERMESTIC* 5, no. 1 (November): 47-68. [10.24198/intermestic.v5n1.4](https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4).
- Carrell, Michael R. 2016. "Public Sector Negotiation: A Real World Integrative Case." *Business Education Innovation Journal* 8, no. 2.
- Chadziq, Achmad Lubabul. 2019. "Perdagangan Internasional." *Jurnal Ekonomi Internasional* 3, no. 2.
- Cholif, Ulim M., and Arie K. Paksi. 2022. "South Korea's Interests behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia." *Insignia Journal of International Relations* 9 (April): 20-36. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2022.9.1.5089>.
- Lestari, Baiq U., Lalu P. Karjaya, and Muhammad Sood. 2021. "Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara." *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (07): 81-109. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.32>.
- Malik, Kusman. 2020. *Politik Kerjasama Perdagangan Bilateral Indonesia*. Deepublish.
- Muchsya, Audrey Dylania. 2020. "Kerja Sama Korea Selatan-Indonesia Dalam Hubungan Special Strategic Partnership Di Bidang Ekonomi Tahun 2018-2019." Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta.
- Rompas, Rebeca P. 2019. "HUBUNGAN DAGANG INTERNATIONAL INDONESIA DAN KOREA SELATAN, 2011-2016." *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 8, no. 1 (September): 1906-1920. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/3860/2963>.
- Santoso, Rizal Budi, and Achmad Alfaron Alamsyah. 2023. "Digital Economy Working Group G20 Pada Masa Presidensi Indonesia Tahun 2022." *Jurnal Perdagangan Internasional* 1, no. 1: 17-33.
- Santoso, Rizal B., and Rina A. Dewi. 2022. "DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA TERHADAP KOREA SELATAN DALAM INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA)." *Indonesian Journal of International Relations* 6, no. Vol. 6 No. 2 (2022): 368-386. <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i2.386>.

Buku

- Putnam, Robert D. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." *International Organization* 42, no. 3 (1988): 427-60. <http://www.jstor.org/stable/2706785>.

Laporan

- Badan Pusat Statistik. 2023. "Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai

- FOB: juta US\$), 2000-2022 - Tabel Statistik.” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAxMCMx/nilai-ekspor-menurut-negara-tujuan-utama--nilai-fob--juta-us---2000-2022.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2023. “Nilai Impor Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF: juta US\$), 2000-2022 - Tabel Statistik.” Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAzNiMx/nilai-impor-menurut-negara-asal-utama--nilai-cif--juta-us---2000-2022.html>.
- Badan Standardisasi Nasional. 2013. “Hasil The 6th Round of Negotiations Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA) - BSN.” Badan Standardisasi Nasional. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/4887/hasil-the-6th-round-of-negotiations-indonesia-korea-comprehensive-economic-partnership-agreement-ikcepa>.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. “Dasar Hukum IKCEPA – DJBC – FTA Knowledge Base.” DJBC – FTA Knowledge Base. <https://fta.beacukai.go.id/docs/ikcepa-indonesia-korea-comprehensive-economic-partnership-agreement/dasar-hukum-ikcepa/>.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. 2019. “Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.” Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/kembali-dimulai-perundingan-ik-cepa-ditargetkan-selesai-pada-2019>.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. 2022. “Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.” Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur>.
- DPR RI. 2022. “Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat.” Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39692/t/javascript;>
- DPR RI. 2022. “Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat.” Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40396/t/DPR%20Setujui%20RUU%20IK%20CEPA%20Menjadi%20UU>.
- FTA Center. 2018. “AK-FTA.” FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/ak-fta>.
- FTA Center. 2023. “SEKILAS TENTANG FTA.” FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/sekilas-tentang-fta>.
- GPEI DPD DIY. 2021. “Peluang & Persiapan Produk Makanan dan Minuman Indonesia Untuk Ekspor ke Korea Selatan.” YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=yAitzefT2Fw>.
- Humas Sekretariat Kabinet RI. 2018. “Presiden Jokowi dan Ibu Negara Tiba di Seoul, Korea Selatan.” Sekretariat Kabinet. <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-dan-ibu-negara-tiba-di-seoul-korea-selatan/>.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. 2022. “UU 25/2022: Pengesahan IK-CEPA.” JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. <https://jdih.maritim.go.id/uu-252022-pengesahan-perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-pemerintah-republik-indonesia->

- dan-pemerintah-republik-korea-ik-cepa.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul. 2021. "Webinar Diplomasi Ekonomi Indonesia di Korea Selatan." Kemlu. <https://kemlu.go.id/seoul/id/news/11898/webinar-diplomasi-ekonomi-indonesia-di-korea-selatan>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. "Joint Ministerial Statement on the Launch of the Reactivation of Negotiations for the Indonesia - Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)." Treaty Kemlu. <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=KOR-2019-0179.pdf>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. "Korea Selatan Sambut Baik Outlook Asean Tentang Indo Pasifik | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Kemlu. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/409/berita/korea-selatan-sambut-baik-outlook-asean-tentang-indo-pasifik>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. n.d. "Profil Negara dan Hubungan Bilateral." KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA, DI SEOUL,, REPUBLIK KOREA. Accessed January 26, 2024. https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu.
- Kementerian Luar Negeri RI. 2021. "Re-Orient Webinar Series Ep.5: IK CEPA Diplomasi Indonesia di Tengah Pandemi." Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=W1E2_CazHLE.
- Kementerian Perdagangan. 2011. "JOINT STUDY GROUP REPORT." FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/ikcepa/joint-study-group-report-indonesia-korea-cepa.pdf>.
- Kementerian Perdagangan. 2022. "Mendag Zulkifli Hasan Bertemu Mendag Ahn Dukgeun Bahas Upaya Peningkatan Perdagangan Indonesia-Republik Korea." FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/mendag-zulkifli-hasan-bertemu-mendag-ahn-dukgeun-bahas-upaya-peningkatan-perdagangan-indonesia-republik-korea>.
- Kementerian Perdagangan. 2022. "Mendag Zulkifli Hasan: Hasil Pertemuan Bilateral, Indonesia-Korea Selatan Tanda tangani Kerja Sama Bisnis Senilai USD 7 Juta." FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/mendag-zulkifli-hasan-hasil-pertemuan-bilateral-indonesia-korea-selatan-tanda-tangani-kerja-sama-bisnis-senilai-usd-7-juta>.
- Kementerian Perdagangan. 2023. "IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Mendag Zulkifli Hasan: "Jalan Tol" Perdagangan Indonesia-Korea Mulai Terbuka Luas." FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-mendag-zulkifli-hasan-jalan-tol-perdagangan-indonesia-korea-mulai-terbuka-luas>.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2019. "Putaran ke-9 Perundingan IK-CEPA." Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/putaran-ke-9-perundingan-ik-cepa>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2018. "AK-FTA." FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/ak-fta>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2019. "Tingkatkan Hubungan Dagang dan

- Investasi: Indonesia dan Korea Selatan Aktivasi Kembali IK-CEPA.” Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/aktivasi-ikcepa>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2019. “Kembali Dimulai, Perundingan IK-CEPA Ditargetkan Selesai pada 2019.” Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/kembali-dimulai-perundingan-ik-cepa-ditargetkan-selesai-pada-2019>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2019. “Indonesia Dorong Penyelesaian IK-CEPA dan Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan dengan Amerika Serikat.” Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-dorong-penyelesaian-ik-cepa-dan-tingkatkan-kerja-sama-perdagangan-dengan-amerika-serikat>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2019. “Perundingan Putaran ke-10 IK-CEPA.” Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/perundingan-putaran-ke-10-ik-cepa>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2019. “Deklarasi Bersama Penyelesaian Perundingan IK-CEPA: Langkah Pasti Menuju Penandatanganan Perjanjian.” Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/deklarasi-bersama-penyelesaian-perundingan-ik-cepa-langkah-pastimenuju-penandatanganan-perjanjian>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2020. “Indonesia–Korea CEPA: Tonggak Baru Hubungan Ekonomi Bilateral Kedua Negara.” Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-korea-cepa-tonggak-baru-hubungan-ekonomi-bilateral-kedua-negara>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2022. “Bersama DPR, Mendag Bahas RUU Pengesahan RCEP dan IK CEPA.” Kementerian Perdagangan. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/bersama-dpr-mendag-bahas-ruu-pengesahan-rcep-dan-ik-cepa>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2022. “Mendag Zulkifli Hasan Optimistis UU RCEP dan IK–CEPA Tingkatkan Ekspor Nasional.” FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/mendag-zulkifli-hasan-optimistis-uu-rcep-dan-ikcepa-tingkatkan-ekspor-nasional>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2022. “Perkuat Ekspor Indonesia ke Korea Selatan dalam IK-CEPA, Kemendag Terbitkan Permendag Nomor 57 Tahun 2022.” FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/perkuat-ekspor-indonesia-ke-korea-selatan-dalam-ik-cepa-kemendag-terbitkan-permendag-nomor-57-tahun-2022>.
- Kementerian Perdagangan RI. 2023. “IK-CEPA.” FTA Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/factsheet-ik-cepa>.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019. “Menperin Mendampingi Presiden dalam Pertemuan Bilateral dengan Korea Selatan.” Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. <https://kemenperin.go.id/artikel/20802/Menperin-Mendampingi-Presiden-dalam-Pertemuan>.
- Kementerian Perindustrian RI. 2023. “Menperin: PMI Manufaktur Juni 2023 Naik Tinggi, Tapi Industri Tekstil Masih Menderita.” Kementerian

- Perindustrian Republik Indonesia.
<https://bbt.kemenperin.go.id/news/konten-55>.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Republik Korea. 2021. "Perdagangan Indonesia dan Korea Selatan." Kemlu.
<https://kemlu.go.id/seoul/id/news/11149/perdagangan-indonesia-dan-korea-selatan>.
- Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. n.d. "Perdagangan dan Investasi." Perdagangan dan Investasi Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia. Accessed July 18, 2023.
https://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2718/contents.do.
- Pemerintah Aceh. 2022. "KADIN adalah Mitra Strategis Pemerintah Mendorong Pergerakan Dunia Usaha Indonesia - BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA ACEH." Humas Aceh. <https://humas.acehprov.go.id/kadin-adalah-mitra-strategis-pemerintah-mendorong-pergerakan-dunia-usaha-indonesia/>.
- Siagian, Bobby C. 2022. "Policy Brief: Pemanfaatan Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-K CEPA) Terhadap Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional | Wadah Kajian | Deputi VII Site." Deputi VII Kemenko Perekonomian.
[https://www.deputi7.ekon.go.id/kajian/policy-brief%3A-pemanfaatan-indonesia-%E2%80%93-korea-comprehensive-economic-partnership-agreement-\(i-k-cepa\)-terhadap-percepatan-pemulihan-ekonomi-nasional](https://www.deputi7.ekon.go.id/kajian/policy-brief%3A-pemanfaatan-indonesia-%E2%80%93-korea-comprehensive-economic-partnership-agreement-(i-k-cepa)-terhadap-percepatan-pemulihan-ekonomi-nasional).
- World Bank. n.d. "Trade (% of GDP) - Indonesia." The World Bank. Accessed February 9, 2024.
<https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2022&locations=ID&start=2017&view=chart>.
- World Bank. n.d. "Trade (% of GDP) - Korea, Rep." The World Bank. Accessed February 9, 2024.
<https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2022&locations=KR&start=2017&view=chart>.

Artikel Daring

- BBC. 2017. "Presiden Korea Selatan dimakzulkan, bagaimana kasusnya?" BBC, March 10, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39228376>.
- Hariyanti, Dini. 2014. "IK-CEPA: Menperin Minta Pertemuan Pendahulu Sebelum Negosiasi ke-8." Ekonomi.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20140819/257/251093/ik-cepa-menperin-minta-pertemuan-pendahulu-sebelum-negosiasi-ke-8>.
- KBS WORLD INDONESIA. 2014. "Presiden Park tekankan kerja sama kebijakan finansial." KBS WORLD.
https://world.kbs.co.kr/service/news_vod_view.htm?lang=i&menu_cate=In&id=Po&Seq_Code=34716.
- Nasution, Dedy D. 2021. "DPR Setujui Ratifikasi Tiga Perjanjian Dagang | Republika Online." Republika Ekonomi.
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/r41ntz370/dpr-setujui-ratifikasi-tiga-perjanjian-dagang>.
- Riswan, Kuntum K. 2022. "KADIN dorong kerjasama dengan Korea Selatan lewat kemudahan investasi." Antaranews.com.

- <https://www.antaraneews.com/berita/3026661/kadin-dorong-kerjasama-dengan-korea-selatan-lewat-kemudahan-investasi>.
- Rokom. 2022. "Transisi Pandemi ke Endemi: Diperbolehkan Tidak Memakai Masker di Ruang Terbuka." Sehat Negeriku. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20220517/0739878/transisi-pandemi-ke-endemi-diperbolehkan-tidak-memakai-masker-di-ruang-terbuka/>.
- Suryanto, Suryanto. 2012. "Indonesia-Korea masuki babak baru kerja sama perdagangan." *ANTARA News*, July 13, 2012. <https://www.antaraneews.com/berita/321481/indonesia-korea-masuki-babak-baru-kerja-sama-perdagangan>.
- Wahyudi, Nyoma A. 2021. "Optimalkan IK-CEPA, GPEI Minta Sosialisasi kepada Ekspertir Lebih Gencar." *Ekonomi*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211208/12/1475112/optimalikan-ik-cepa-gpei-minta-sosialisasi-kepada-ekspertir-lebih-gencar>.
- Wahyudi, Stepanus I Nyoman A. 2021. "IK-CEPA Tak Akan Obati Defisit Perdagangan TPT terhadap Korsel." *Bisnis Indonesia.id*. <https://bisnisindonesia.id/article/ikcepa-tak-akan-obati-defisit-perdagangan-tpt-terhadap-korsel>.